

Menempatkan Perikanan Skala Kecil dalam Perjuangan Agroekologi dan Kedaulatan Pangan Global

Irmak Ertör, Zoe W. Brent, David Gallar & Thibault Josse



PENULIS : Irmak Ertör, Zoe W. Brent, David Gallar dan Thibault Josse

PEMERIKSA NASKAH : Deborah Eade

DESAIN : Bas Coenegracht

PENERJEMAH: Analía Penchaszadeh [Bahasa Spanyol]; Charlène Jouanneau [Bahasa Perancis];
Marthin Hadiwinata [Bahasa Indonesia]; İlker Göçmen [Bahasa Turki]

Gambar Muka: T. Josse

Gambar Muka Dalam : WFFP dan LVC saat COP21, 2015. Foto oleh Z.W. Brent

Diterbitkan oleh Transnational Institute; Perkumpulan Pleine Mer; dan Solidaritas Perempuan
Amsterdam November 2020

Isi laporan ini dapat dikutip atau direproduksi untuk tujuan non-komersial, selama sumber informasi dikutip dengan benar. Penerbit secara bersama-sama akan menghargai jika bisa menerima salinan atau tautan dari teks di mana dokumen ini digunakan atau dikutip. Harap dicatat bahwa untuk beberapa gambar, hak cipta mungkin berada di tempat lain dan ketentuan hak cipta dari gambar tersebut harus didasarkan pada ketentuan hak cipta dari sumber aslinya.
<http://www.tni.org/copyright>

This publication has been developed in the course of the Deck-to-dish: Community-supported-fisheries advanced training project co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union; the European Commission cannot be held responsible for the information presented.



PENGHARGAAN

Ucapan terima kasih yang berhingga kepada para nelayan baik laki-laki dan perempuan yang berbagi waktu dan pengetahuan dengan kita. Kami sangat berterima kasih memberikan penghargaan kepada anggota dari SP Anging Mammiri (SP Makassar), Istanbul Birlik and Pleine Mer karena dukungan yang sangat berharga dalam kerja penelitian lapangan dan juga untuk bimbingan yang kami dapatkan saat mendalami berbagai masalah yang di bahas dalam laporan ini. Kami juga berterima kasih atas berbagai organisasi lain yang telah memberikan kerja bersama dan yang telah dan terus membantu untuk memahami fakta realitas nelayan: WFFP dan berbagai anggotanya di seluruh dunia, KNTI, dan MARE di Indonesia dan the Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française di Prancis. Dan terakhir, terima kasih kepada kerabat peninjau naskah atas komentar yang memberikan wawasan atas draft awal dalam kerja ini. Kesalahan yang masih terdapat dalam terbitan adalah ditujukan ke kami.

Daftar Isi

1	Pendahuluan: Gambaran peristiwa politik	5
1.1	Perbedaan dan Persamaan antara gerakan petani kecil dan nelayan skala kecil	6
2	Pemetaan perjuangan agroekologi dan kedaulatan pangan dengan inisiatif nelayan skala kecil	8
3	Praktik dan alternatif di beberapa daerah: Pengalaman kunci dari akar rumput	12
3.1	Transformasi dan relokalisasi ekonomi pangan	12
	Perikanan skala kecil di Turki dan pengalaman Istanbul Birlik	13
	Perkembangan politik nasional dan internasional Istanbul Birlik	15
	Keterikatan dengan gerakan kedaulatan pangan lainnya	16
	Menempatkan gagasan ke dalam praktik: Model Penjualan Langsung dan Toko Mitra	17
	Jaringan-Jaringan Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (CSF): aliansi dengan kelompok konsumen agroekologi dan pemerintah kota	19
3.2	Pertahanan sumber daya alam: Landasan transformasi sistem pangan	19
	Gender dan kewilayahan dalam sektor perikanan Indonesia	21
	Makassar: Pusat pelayaran Indonesia yang meminggirkan nelayan tradisional	21
	Dampak gender terhadap pembangunan infrastruktur	22
	Patriarki yang dilembagakan	23
	Mobilisasi dan jalan ke depan	24
	Implikasi bagi gender dan kedaulatan pangan	25
3.3	Buruh dalam sistem pangan	26
	Lintasan berulang atas penggusuran dan eksploitasi dalam Sektor Perikanan	26
	Memicu migrasi orang Senegal	27
	Menciptakan kerentanan dalam sektor perikanan Eropa	29
	Menemukan jalan untuk bertahan hidup di Eropa	32
	Munculnya solidaritas dan aksi kolektif di sektor perikanan?	33
4	Kesimpulan	34

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini mengeksplorasi perjuangan gerakan politik dan praktik perikanan skala kecil yang membentuk bagian dari perjuangan agroekologi dan kedaulatan pangan global. Dengan maksud ini, tujuan pertamanya adalah untuk menggambarkan proses politik dan menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh inisiatif nelayan dan komunitasnya serta bagaimana nelayan terorganisir dalam upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kedua, laporan ini memetakan perjuangan gerakan agroekologi dan kedaulatan pangan terkini dari Nelayan Skala Kecil (SSF) dan menunjukkan bagaimana sistem pangan alternatif yang termasuk sektor perikanan ditempatkan dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan dan aliansi perjuangan lainnya. Kemudian, laporan ini menghubungkan kenyataan dan perjuangan nelayan dengan tiga perdebatan kunci seputar gerakan kedaulatan pangan yang berasal dari pengalaman akar rumput. Analisis ini mengungkap tantangan untuk mentransformasi bentuk dan merelokalisasikan ekonomi pangan dengan melihat pengalaman proses penjualan ikan secara langsung serta peran koperasi perikanan skala kecil di Turki. Selanjutnya penelitian ini mengangkat berbagai tantangan-tantangan dari perjuangan dalam mempertahankan sumber daya alam dan pentingnya kepemimpinan perempuan dengan mengkaji aspek gender dan wilayah dalam perikanan Indonesia. Terakhir, penelitian ini juga memotret realitas tenaga kerja dalam sistem pangan dan mengungkapkan pentingnya melawan eksploitasi di sektor perikanan tersebut dengan mengeksplorasi persimpangan antara migrasi dan perikanan di Afrika Barat dan Eropa. Secara bersama-sama kasus-kasus tersebut memperjelas hubungan antara perikanan dan perjuangan untuk agroekologi serta transformasi sistem pangan dengan cara mengkaji karakteristik khusus mereka dalam keadaan situasi setempat tetapi juga menyoroti praktik-praktik yang sudah berjalan, yang juga berkontribusi pada perjuangan kedaulatan pangan.

Penelitian lapangan dilakukan untuk masing-masing kasus tersebut dilakukan pada tahun 2018 dan 2019, dengan menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara dengan para nelayan dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di komunitas nelayan. Sejak saat itu, dan selama penyelesaian penulisan laporan ini, pandemi Virus Corona telah membuka tabir rapuhnya sistem pangan global yang dikendalikan korporasi usaha dan dalam banyak kasus memperdalam ketimpangan dan ketidakadilan yang digambarkan dalam laporan ini. Migrasi jarak jauh

dan distribusi global yang sangat diandalkan oleh sistem pangan industri global terputus. Harga ikan anjlok, restoran berhenti membeli dan banyak tempat pelelangan ikan ditutup. Pengangguran meningkat, pembatasan sosial (*lock-down*) dan penutupan sekolah memperburuk kondisi dalam rumah tangga, dan banyak perempuan yang menanggung beban tambahan tersebut. Pada saat yang sama, respon terhadap COVID-19 di daerah komunitas nelayan skala kecil telah menggambarkan secara jelas bahwa banyak pengetahuan-pengetahuan dan infrastruktur untuk membangun kedaulatan pangan sudah ada sejak lama. Jejaringan penjualan secara langsung dalam skala kecil meledak yang kemudian berkontribusi pada sistem pangan lokal yang lebih tangguh yang menghargai dan menghubungkan nelayan tradisional musiman dengan pelanggan lokal mereka secara langsung. Selain itu, pertukaran pangan yang dilakukan oleh petani-nelayan memberikan harapan kehidupan bagi penyedia pangan yang bekerja secara serabutan, proses ini menjamin ketahanan pangan walaupun berada di tengah situasi ekonomi yang kekurangan. Meskipun sebagian besar penelitian dilakukan sebelum terjadi perubahan situasi penting, dan karena itu tidak berpusat pada situasi pandemi yang berlangsung, beberapa poin yang diperlihatkan kemudian untuk menekankan relevansi dari berbagai masalah dalam situasi dunia pasca pandemi COVID-19.



Gambar 1: Kampung nelayan di Indonesia. Foto oleh Zoe. W. Brent

1 Pendahuluan: Gambaran peristiwa politik

Nelayan mewakili pilar utama produksi pangan global. Komunitas nelayan skala kecil dan pelaku usaha perikanan skala kecil komersial pada khususnya, memainkan peran penting dengan menyediakan sekitar dua pertiga tangkapan ikan yang ditujukan untuk konsumsi manusia secara langsung. Lebih dari 90% nelayan dan pekerja perikanan di sektor ini bekerja dalam kategori perikanan skala kecil¹. Namun, sektor perikanan juga menjadi tempat dari berbagai ketidakadilan: kapal perikanan skala industri yang paling besar menangkap 65% dari semua tangkapan ikan global. Dalam beberapa kasus, praktek kapal-kapal penangkap ikan skala besar ini menyebabkan terjadinya penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*) dan menipisnya ketersediaan stok ikan yang sekaligus menggunakan alat tangkap yang merusak dan bahan bakar yang memicu perubahan iklim.² Pada saat yang sama, akses dan kontrol perikanan nelayan skala kecil atas wilayah perairan laut dan air tawar serta sumber daya perikanan semakin meningkat dibatasi.³ Perikanan industri skala besar menciptakan logika penyeragaman (monokultur) dan komodifikasi tanaman yang diperlihatkan dalam industri pertanian, misalnya dengan memusatkan kendali kuota penangkapan ikan dan / atau hak akses kedalam tangan dari beberapa kapal penangkap ikan trawl skala besar. Hal ini yang menyebabkan kerusakan sosial dan ekologis yang luar biasa dan pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat pesisir dan sumber penghidupan mata pencaharian mereka.

Menghadapi peminggiran, marjinalisasi, perampasan, dan pengusuran yang kian meningkat, komunitas nelayan skala kecil telah bergerak, membangun organisasi secara lokal, nasional dan internasional, membentuk Forum Dunia untuk Pekerja Perikanan dan Pembudidaya Ikan (World Forum of Fish Workers and Fish Harvesters/WFF) pada tahun 1997 dan Forum Dunia dari Rakyat Nelayan (the World Forum of Fisher People/WFFP) yang dibentuk pada tahun 2001.⁴ Kedua organisasi ini berkolaborasi satu sama lain serta dengan organisasi seperti Kolektif Internasional Pendukung Pekerja Perikanan (the International Collective in Support of Fishworkers/ICSF), dan gerakan petani kecil seperti La Via Campesina. Nelayan akhirnya telah menjadi aktor politik kunci dalam gerakan kedaulatan pangan dengan petani, menerbitkan manifesto bersama, dan mengorganisir pertemuan informal. Mereka juga bergerak bersama dalam suatu kelembagaan politik yang lebih formal untuk bekerja sama, misalnya, dalam Komite Perencanaan Internasional (International Planning Committee/IPC) untuk Kedaulatan

Pangan yang berbasis di Roma, di mana kelompok ini bersama-sama berjuang untuk pengakuan atas hak-hak asasi mereka sebagai produsen pangan skala kecil.⁵

Di tingkat nasional dan regional, berbagai organisasi nelayan dan aliansi dengan berbagai karakteristik yang berbeda, telah terlibat dan menjadi aktor utama dalam gerakan untuk kedaulatan pangan. Sebagian merupakan anggota WFF dan WFFP dengan skala organisasi dan juga inisiatif yang berbeda dalam mendukung gerakan nelayan, termasuk namun tidak terbatas pada: Gerakan Perempuan Nelayan dan Nelayan Tradisional (the Movement of Artisanal Fisherwomen and Fishermen/MPP) dan Komite Nelayan Penggembala (the Fisherfolk Pastoral Commission/CPP) dari Brasil, Aliansi Perikanan Laut Atlantik Barat Laut (the Northwest Atlantic Marine Alliance/NAMA) dari Amerika Serikat⁶, Forum Pekerja Perikanan Nasional (the National Fishworkers Forum/NFF) dari India, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dari Indonesia, Istanbul Birlik dari Turki, C-Condem di Ecuador, Masifundise di Afrika Selatan, Jaringan Jurnalis untuk Perikanan Berkelanjutan (the network of journalists for responsible fisheries in Western Africa/REJOPRAO)⁷ di Afrika Barat, Jaringan untuk Mempertahankan Kedaulatan Pangan (the network for the defence of food sovereignty/REDSAG⁸) di Guatemala, dan banyak lainnya.

Terlepas dari sejarah penting keterlibatan para nelayan ini, sejak dicetuskan oleh La Via Campesina pada tahun 1996, istilah kedaulatan pangan terutama dikaitkan dengan produksi pangan agroekologis di tanah, sehingga kemudian menghilangkan peran dari nelayan dalam kedaulatan pangan dan agroekologi.

Dalam laporan ini, kami mengeksplorasi apa arti kedaulatan pangan dan agroekologi dalam konteks perikanan, menyoroti peran nelayan dalam mengorganisir perubahan sistem pangan. Untuk melakukan ini, kami mengacu pada definisi kedaulatan pangan yang diusulkan oleh gerakan sosial (termasuk WFFP dan WFF) dalam Forum untuk Kedaulatan Pangan, di Nyéléni pada tahun 2007:

Kedaulatan pangan adalah hak rakyat untuk pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang dihasilkan melalui cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta hak mereka untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Kedaulatan pangan menempatkan mereka yang memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi pangan berada

pada pusat sistem dan kebijakan pangan daripada tuntutan pasar dan korporasi. Kedaulatan pangan juga berfungsi untuk membela kepentingan dan partisipasi generasi berikutnya. Kedaulatan pangan menawarkan strategi untuk melawan dan membongkar korporasi perdagangan dan rezim pangan saat ini, dan arahan untuk sistem pangan, pertanian, penggembala dan perikanan yang ditentukan oleh produsen pangan lokal.⁹

Sementara itu, seperti yang diungkapkan oleh gerakan kedaulatan pangan dalam deklarasi Nyéléni di forum internasional agroekologi tahun 2015, kami memahami bahwa agroekologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan diperlukan untuk memajukan kedaulatan pangan. Agroekologi dalam pengertian ini tidak hanya dibingkai

dalam dimensi teknis dan produktifnya tetapi juga dalam istilah sosial-ekonomi, politik dan budaya:

Solusi nyata untuk krisis iklim, malnutrisi, dan lain-lain, tidak akan muncul dari penyesuaian ke bentuk model industrialisasi. Kita harus mengubah hal itu dan membangun sistem pangan lokal kita sendiri, yang menciptakan hubungan kaitan yang baru antara pedesaan-perkotaan, berdasarkan pada produksi pangan agroekologis yang sesungguhnya oleh petani, nelayan tradisional, penggembala, masyarakat adat, dan lain-lain. (...) Kami melihat [agroekologi] sebagai alternatif penting untuk [model produksi industri pangan], dan sebagai cara untuk mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi pangan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kemanusiaan dan Ibu Bumi.¹⁰

1.1 Perbedaan dan Persamaan antara gerakan petani kecil dan nelayan skala kecil

Nelayan skala kecil dan petani di seluruh dunia memiliki realitas sejarah dan sosial yang berbeda. Aktivitas, perlengkapan dan alat produksi, serta metode dan budaya mereka, sangat bervariasi.¹¹ Namun, keduanya — seperti juga peternak lebah, penggembala, masyarakat adat, orang yang tidak memiliki tanah dan rakyat pekerja, dll. — merupakan aktor sosial yang memproduksi bagi sektor utama, merawat bumi dan memberi makan dunia. Dan pada kenyataannya, dalam situasi dan ekonomi lokal, terutama di belahan selatan negara dunia, banyak nelayan adalah petani dan banyak petani adalah nelayan. Mereka menghadapi tantangan serupa yang disebabkan oleh sistem pangan kapitalis global dan juga terancam oleh perampasan tanah dan laut.¹² Melihat ancaman bersama ini, tujuan bersama dari agroekologi dan kedaulatan pangan telah muncul dari perjuangan yang dipimpin oleh produsen pangan skala kecil yang menyediakan dan memberikan makanan kepada dunia dan berjuang untuk mempertahankan metode-metode tradisional untuk produksi pangan dan akses mereka terhadap tanah dan laut.

Meskipun perjuangan kedaulatan pangan baik di darat maupun di laut (termasuk samudra, laut, wilayah perairan tawar, dan perikanan pedalaman di sungai atau muara) memiliki banyak kesamaan, seringkali hanya ada sedikit kesadaran dan pengetahuan tentang perikanan tangkap skala kecil dan tantangan yang mereka hadapi, serta solusi yang mereka usulkan bahkan di antara individu dan kelompok yang bekerja untuk kedaulatan pangan. Ditambah lagi, meskipun praktik produksi pangan berbasis tanah daratan sangat berdampak pada keberlanjutan irigasi air karena

limpasan atau kontaminasi akuifer, seringkali ancaman yang disebabkan oleh pestisida dan / atau substansi hormon dalam industri pertanian dan peternakan tidak dianggap sebagai masalah perikanan. Dengan demikian, jejaring dan koalisi kedaulatan pangan yang ada, dalam banyak kasus, kurang ada suara nelayan. Pada saat yang sama, organisasi nelayan yang menghadapi perampasan laut, penurunan stok ikan dan marjinalisasi ekonomi, seringkali berjuang agar suara mereka didengar.

Selain itu (atau mungkin karena) kurangnya kesadaran tentang peran nelayan dalam kedaulatan pangan, nelayan skala kecil terkadang tidak melihat diri mereka sebagai bagian organik dari perdebatan tentang agroekologi dan kedaulatan pangan. Hal ini terkadang menyebabkan beberapa gerakan nelayan dan inisiatif nelayan untuk menolak penggunaan istilah 'agroekologi', karena mereka menganggapnya sebagai perdebatan terkait dengan isu pertanian. Meskipun demikian, praktik nyata dari nelayan skala kecil dan usulan politik yang dikemukakan oleh gerakan nelayan skala kecil seringkali mengandung semangat agroekologi dan kedaulatan pangan. Kekakuan ini tidak hilang pada para pimpinan gerakan yang melihat strategi penting menumbuhkan aliansi di antara berbagai produsen pangan skala kecil berbasis lahan dan air serta gerakan kedaulatan pangan. Seperti yang disampaikan oleh Naseegh Jaffer, mantan Sekretaris Jenderal WFFP,

Pada intinya, kedaulatan pangan bukanlah hal baru bagi komunitas nelayan. Secara sederhana, ini hanya memberi kita bahasa baru untuk menggambarkan apa yang telah membentuk hati dan jiwa untuk



Gambar 2 – WFFP GA, 2017. Foto oleh Zoe. W. Brent

mempertahankan wilayah kita, warisan kita, dan kapasitas kita demi menghasilkan pangan yang sehat, baik, dan berlimpah. Kedaulatan Pangan adalah pusat perjuangan kita melawan neo-liberalisme dan kapitalisme global. Ini memberikan kerangka kerja untuk berbagi pengetahuan dan kearifan lokal, tradisional dan baru di antara komunitas nelayan yang menjadi bagian konstituen dari WFFP.¹³

Pada Majelis Umum WFFP pada tahun 2014 di Cape Town, Afrika Selatan, memutuskan untuk memulai kampanye terhadap kedaulatan pangan. Sejak saat itu, kelompok kerja kepemimpinan dan kedaulatan pangan telah bekerja untuk memperdebatkan, menyebarluaskan, dan mendalami bahasa dan konsep kedaulatan pangan dan agroekologi di dalam organisasinya dalam upaya untuk membangun kapasitas guna mengartikulasikan dan menggerakkan konsep-konsep tersebut. Namun, karena penggunaan konsep agroekologi dan kedaulatan pangan dalam perjuangan nelayan kecil masih terbatas, dalam beberapa kasus nelayan skala kecil telah mengembangkan kosa kata mereka sendiri dalam upaya untuk menjawab konsep atau tantangan serupa agar suaranya didengar dan menjadi lebih terlihat sebagai aktor politik. Contoh penting adalah slogan yang diadopsi oleh Sidang Umum ke-7 WFFP pada tahun 2017 di India: “Kami adalah Rakyat, Kami adalah Lautan!”

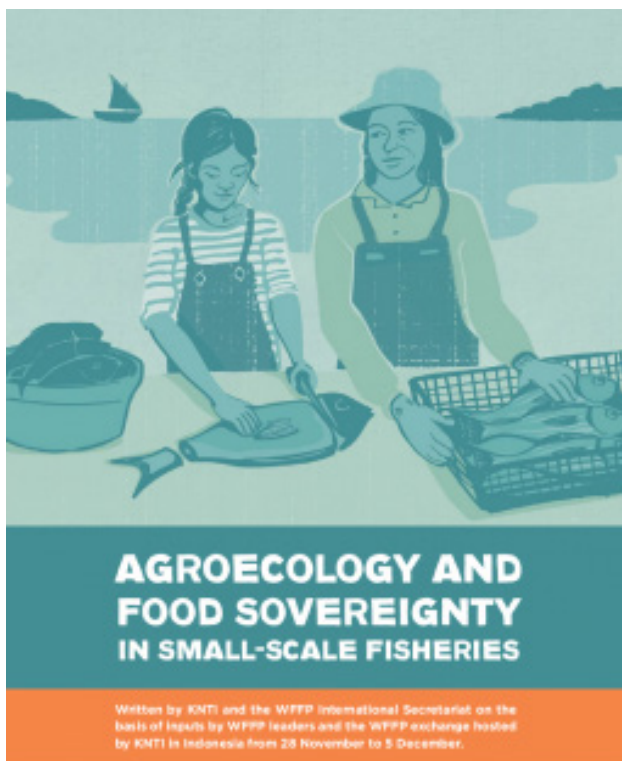
Dalam contoh lain, nelayan terlibat dalam dialog langsung dengan bahasa Kedaulatan Pangan. Dalam publikasi tahun 2017, yang dihasilkan dari pertukaran belajar antar

nelayan yang diadakan di Indonesia dalam topik kedaulatan dan agroekologi,¹⁴ WFFP dan KNTI telah mengurai apa yang dimaksud dari enam pilar kedaulatan pangan (1. Berfokus pada pangan untuk rakyat; 2. Menghargai produsen pangan; 3. Melokalkan sistem pangan; 4. Mengendalikan secara lokal; 5. Membangun pengetahuan dan keterampilan; dan 6. Bekerja dengan alam) dalam konteks perikanan. Laporan ini merupakan upaya awal WFFP untuk menunjukkan keberlanjutan dan kesamaan visi perjuangan nelayan skala kecil dengan aktor sosial lain seperti kaum tani atau penggembala dalam gerakan kedaulatan pangan, dan untuk menyoroti perjuangan politik bersama dari aliansi yang berbeda.

Meskipun demikian, kami percaya bahwa keluwesan tentang istilah adalah penting untuk mengidentifikasi praktik dan aliansi yang sudah ada dari komunitas dan organisasi nelayan skala kecil yang berkontribusi pada kedaulatan pangan dan agroekologi. Niat kami dalam laporan ini bukan untuk memikirkan bahasa atau kata yang tepat. Sebaliknya, kami mengeksplorasi berbagai cara di mana nelayan skala kecil benar-benar mempraktikkan dan memperjuangkan alternatif yang terlihat seperti kedaulatan pangan dan agroekologi, apakah mereka menyebutnya demikian atau tidak. Dengan ini, kami berharap dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang realitas pengalaman empiris dan agroekologis yang menghubungkan nelayan skala kecil dengan gerakan kedaulatan pangan yang lebih luas.

2 Pemetaan perjuangan agroekologi dan kedaulatan pangan dengan inisiatif nelayan skala kecil

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana agroekologi dan kedaulatan pangan telah ada dan dapat dipadukan lebih lanjut dalam perjuangan nelayan skala kecil, kami memulai dengan tinjauan pustaka berdasarkan berbagai sumber primer dan sekunder di mana istilah yang tepat dari "agroekologi, kedaulatan pangan dan perikanan" dapat ditemukan.¹⁵ Dan meskipun literatur tersebut terbatas, ada peningkatan minat aktivis dan minat ilmiah¹⁶ dalam permasalahan yang terkait pada sektor akuatik (perairan laut dan air tawar) dari sisi agroekologi dan kedaulatan pangan. Tantangan besar yang dihadapi organisasi komunitas nelayan skala kecil menjadi lebih terlihat dan, sebagai hasilnya, ada minat yang meningkat untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan.



FORO MUNDIAL DE PUEBLOS PESCADORES
WORLD FORUM OF FISHER PEOPLES
FORUM MONDIAL DES POPULAIRES DE PÊCHERS

Report: September 2017
Indonesia

Gambar 3: Sampul publikasi WFPF

Sampai saat ini, definisi tertulis yang paling lugas dan konseptualisasi tentang agroekologi dan gerakan kedaulatan pangan dalam Perikanan Skala Kecil telah ditulis dalam kolaborasi dengan gerakan nelayan: "*La pesca artesanal en la discusión de la Soberanía Alimentaria*"¹⁷ dan, yang disebutkan di atas, "*Agroecology and Food Sovereignty in Small-Scale Fisheries (Agroekologi dan Kedaulatan Pangan dalam Perikanan Skala Kecil)*".¹⁸ Sementara yang pertama berfokus pada hak-hak asasi nelayan dengan mengkonseptualisasikan laut sebagai milik bersama (*commons*), serta juga pada masalah ekologi dan lingkungan dan ancaman terhadap nelayan skala kecil. Sementara yang kedua, menekankan pada hak-hak nelayan skala kecil dalam menghadapi sistem pangan kapitalis global dengan mempelajari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan agroekologi dan gerakan kedaulatan pangan serta mengaitkan perjuangan di darat dan laut.

Di luar itu, hanya ada segelintir sumber dan inisiatif yang secara ekstensif berfokus pada perikanan skala kecil dalam konteks agroekologi dan kedaulatan pangan dengan menggunakan terminologi yang sama. Pertama, sejumlah publikasi akademis dan ilmiah yang membahas secara langsung dengan topik perikanan dan kedaulatan pangan dan / atau agroekologi (lihat Colombo dkk., 2015¹⁹; Seixas dkk., 2018²⁰; Cotrim, 2009²¹; Levkoe dkk., 2017²²; Rodríguez-Crisóstomo, 2016²³; Inakake de Souza, 2017²⁴). Berbagai publikasi ini telah dilengkapi oleh para aktivis dan publikasi populer (misalnya, edisi khusus jurnal *Soberania Alimentaria*, *Biodiversidad y Cultura* tentang perikanan dan komunitas nelayan yang diterbitkan pada tahun 2016²⁵; *Pesca y agroecología* dalam terbitan *Newsletter Nyéléni*, 2016²⁶).

Namun, konseptualisasi peran nelayan dalam mentransformasikan sistem pangan paling sering ditemukan dalam dokumen dan deklarasi yang dihasilkan dari a.) Majelis atau pertemuan gerakan dan aktivis rakyat nelayan dalam rangka menumbuhkan debat kedaulatan pangan (misalnya pada Sidang Umum WFPF ke-7 di India pada tahun 2017, pertemuan MPP di Brasil, berbagai kerja yang

dilakukan oleh Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan (International Planning Committee/IPC) dalam Kelompok Kerja Perikanan²⁷); atau b.) pertemuan para aktor sosial dalam gerakan kedaulatan pangan yang lebih luas di mana para masyarakat nelayan dan berbagai perjuangan mereka disebutkan - meskipun kadang-kadang singkat atau tanpa fokus yang luas; deklarasi organisasi produsen pangan skala kecil dan organisasi masyarakat sipil pada Simposium Internasional Agroekologi II yang diselenggarakan oleh FAO²⁸ pada April tahun 2018; kongres nasional pertama dan deklarasi “Encontro Unitario dos Trabalhadores, Trabalhadoras e Povos do Campo, das Águas e das Florestas” yang berlangsung pada tahun 2012 dengan partisipasi MPP dan CPP²⁹; dan webinar tentang COVID-19 dan nelayan kecil Afrika Utara dan Palestina yang diselenggarakan oleh Jaringan Kedaulatan Pangan Afrika Utara (NAFSN) dan Transnational Institute pada Mei 2020³⁰); atau terakhir (v) beberapa dokumen atau pedoman terbaru yang diterbitkan dalam kerangka politik kelembagaan internasional seperti Pedoman Tata Kelola Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (IPC dkk., 2016),³¹ dan lebih umum lagi deklarasi pertemuan kedaulatan pangan seperti

kongres internasional La Via Campesina tahun 2017 atau Nyéléni tahun 2007 dan 2015. Teks forum Nyéléni pada tahun 2015 tentang Agroekologi misalnya mencakup penangkapan ikan secara tradisional dalam konsepsi praktik agroekologi:

Praktik produksi Agroekologi (seperti tumpang sari, penangkapan ikan tradisional dan penggembala keliling, mengintegrasikan tanaman, pohon, ternak dan ikan, pemupukan, kompos, benih lokal dan bibit ternak, dan lain-lain) yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi seperti membangun kehidupan di tanah, daur ulang nutrisi, pengelolaan dinamis dari keanekaragaman hayati dan konservasi energi di semua tingkat skala.³²

Deklarasi ini mengakui daerah penangkapan ikan sebagai wilayah yang menjadi pusat sistem agroekologi dan pentingnya menghargai pengetahuan nelayan tradisional, dan memfasilitasi pertukaran melalui pelatihan “nelayan-ke-nelayan”.

Sejalan dengan visi ini, meningkatnya minat pada perjuangan perikanan skala kecil dalam agroekologi dan debat politik kedaulatan pangan telah memberi jalan



Gambar 4 – Pertukaran antara nelayan, Valencia, 2018. Foto oleh Zoe. W. Brent

bagi munculnya beberapa kerjasama dan berbagi pengetahuan di antara berbagai aktor sosial. Misalnya, pada Mei 2018, Kongres Internasional ke-7 tentang Agroekologi berlangsung di Cordoba, yang diselenggarakan oleh ISEC (Institute of Sociology and Peasant Studies) dari Universitas Cordoba dan OSALA³³ (Observatory for Food Sovereignty and Agroecology). Kongres tersebut mencakup Kelompok Kerja Perikanan dan Agroekologi dengan pemateri yang membahas pengalaman perikanan skala kecil dan kaitannya dengan agroekologi melalui studi kasus dari Brazil, Meksiko, Spanyol, India dan Sri Lanka serta dari perspektif global. Sejak itu, kelompok ini telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan lanjutan untuk mengeksplorasi hubungan dan praktik dari agroekologi dalam kegiatan perikanan, di Valencia (Desember 2018), dan kemudian di Barcelona (Juni 2019).

Pada November 2018, anggota WFFP dari wilayah Eropa dan beberapa orang pendukung dari organisasi masyarakat sipil (OMS) berkumpul di Thessaloniki, Yunani untuk membahas bagaimana memajukan perdebatan agroekologi dan kedaulatan pangan dalam gerakan perikanan nelayan skala kecil serta bagaimana menempatkan debat ini berkaitan bagi setiap inisiatif lokal. Simposium Urgensi ke-7 juga mempertemukan inisiatif Pertanian Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Agriculture/CSA) dan Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Fisheries/CSF) —seperti Jaringan Produsen Lokal (Local Catch Network/LCN) dari Amerika dan Istanbul Birlik dari Turki — dan jejaring lainnya secara bersama-sama menyediakan ruang di mana hubungan antara darat dan laut berdasarkan praktik serta gerakan agroekologi dan kedaulatan pangan yang kemudian bisa digali lebih lanjut.

Pertemuan ini memunculkan gagasan kerja baru: Urgensi, Pleine Mer (Prancis), Local Catch Network (AS), Transnational Institute, dan Istanbul Birlik untuk berkolaborasi dalam proyek berjangka tahunan pada Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Fisheries/CSF). Program kerja ini bertujuan untuk mengembangkan pelatihan antara nelayan-ke-nelayan, memberdayakan perikanan skala kecil, komunitas dan sistem pangan lokal mereka, dan untuk memetakan serta menghubungkan jaringan tersebut sehingga mereka dapat memperkuat gerakan mereka sendiri dan membangun aliansi yang lebih kuat.

Contoh lain dari inisiatif pembelajaran kolaboratif yang mengeksplorasi peran perikanan dalam kedaulatan pangan adalah "Rise Up!" 2020, sekolah virtual musim panas yang

diselenggarakan oleh Aliansi Komunitas untuk Keadilan Global (Community Alliance for Global Justice) berbasis di Seattle, Washington.³⁴ Kurikulum difokuskan pada pemahaman komunitas nelayan adat yang bergerak di sekitar konsep kedaulatan pangan, begitu pula termasuk kampanye melawan Salmon yang dimodifikasi secara genetik di AS.³⁵

Sebagai tambahan atas berbagai kerja yang secara nyata menyoroti peran perikanan skala kecil dalam konteks agroekologi dan kedaulatan pangan, ada suatu literatur yang lebih luas, yang menghubungkan perikanan nelayan skala kecil dengan terminologi terkait dan atau serupa. Ini termasuk: pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan / atau berbasis masyarakat; ekonomi komunitas / alternatif; pendekatan hak asasi manusia untuk perikanan; hak tenurial komunitas nelayan; memastikan hak nelayan kecil; hak atas makanan; hak atas milik bersama dan merebut kembali laut, sosial dan budaya masyarakat nelayan; perikanan yang didukung komunitas (CSF); pengelolaan bersama/kolaboratif (*co-management*); dan pengelolaan berbasis ekosistem. Dalam literatur akademis dan ilmiah yang berfokus pada hak-hak nelayan skala kecil, artikel tentang pengelolaan perikanan berbasis komunitas dan penjualan langsung produk perikanan skala kecil (contohnya, Stoll dkk., 2015³⁶; Bolton dkk., 2016³⁷; Brinson dkk., 2011³⁸) sangat relevan dengan perdebatan kedaulatan pangan dan agroekologi.



Gambar 5 – Pelelangan ikan secara langsung, Montgat. Foto oleh Zoe. W. Brent



Gambar 6: Kampung nelayan di Indonesia. Foto oleh Zoe W. Brent

Terakhir, penting untuk menyoroti perkembangan dokumen kelembagaan resmi (terutama yang diterbitkan oleh FAO) yang menyebutkan hak-hak perikanan skala kecil atau hak tenurial seperti “Mengatasi tantangan pangan dan pertanian: agenda petani kecil,”³⁹ “Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Tenurial atas Tanah, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional”⁴⁰ dan “Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan”.⁴¹ Dokumen-dokumen ini menetapkan panduan tentang bagaimana menghargai kehidupan dan sumber penghidupan dari produsen pangan skala kecil dan oleh karena itu penting bagi kedaulatan pangan. Meledaknya berbagai kerja kelembagaan tentang hak-hak asasi nelayan ini sebagian besar merupakan cerminan dari pengorganisasian besar-besaran yang dilakukan oleh gerakan nelayan global dan regional. WFFP dan WFF bersama dengan aliansi memainkan peran penting dalam melobi dan menyusun dokumen dan deklarasi ini, khususnya dalam proses terbitnya Pedoman Sukarela untuk Melindungi Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan dalam Rangka Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan. Setelah diberikan persetujuan terhadap pedoman tersebut pada tahun 2014, gerakan nelayan skala kecil menasar untuk memberikan berbagai tekanan kepada Negara Anggota FAO untuk segera mewujudkan pelaksanaan panduan tersebut. Tujuan ini untuk memastikan bahwa implementasi pedoman tersebut diterima oleh Komite Perikanan (COFI) FAO melalui pengembangan mekanisme pelengkap,

yaitu Kerangka Kerja Strategis Pedoman Perikanan Skala Kecil (SSF Guidelines Global Strategic Framework/SSF-GSF), yang bertujuan untuk mendorong suatu pendekatan berbasis hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran, dan menetapkan jalur yang efektif untuk pelaksanaan dan pemantauan pedoman tersebut di tingkat nasional dengan melibatkan semua pemangku kepentingan perikanan skala kecil dari semua wilayah.⁴² Selanjutnya, pengadopsian terkini terhadap Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas/UNDROP, diadopsi oleh PBB pada 17 Desember 2018⁴³), yang juga secara tegas mendefinisikan dan mempromosikan hak dan kerangka nelayan skala kecil sebagai aktor sentral dalam kedaulatan pangan, yang salah satu capaiannya terwujud dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai kelompok seperti kaum tani kecil, penggembala, rimbawan, peternak lebah, dan komunitas lokal lainnya.

Meskipun bukan daftar yang sangat lengkap, berbagai daftar tersebut mewakili contoh-contoh kunci, yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir, di mana istilah bahasa kedaulatan pangan telah dikaitkan dengan perikanan skala kecil (bahkan, dalam beberapa contoh kasus, oleh lembaga di mana perikanan skala kecil tidak menetapkan agendanya). Dalam contoh lain, organisasi yang dipimpin nelayan skala kecil telah membingkai perjuangan mereka sejalan dengan gerakan kedaulatan pangan yang telah memperkuat aliansi antara nelayan dan gerakan kedaulatan pangan yang lebih luas.

3 Praktik dan alternatif di beberapa daerah: Pengalaman kunci dari akar rumput

Di luar kerangka politik dan publikasi yang menggunakan terminologi khusus, ada banyak cara di mana prinsip-prinsip dari kedaulatan pangan dibawa dan dihidupkan dalam berbagai komunitas nelayan. Dengan menghubungkan pengalaman nelayan dengan diskursus yang lebih luas yang harus dihadapi dalam proses pembangunan kedaulatan pangan, kami berharap untuk, di satu sisi dapat memperkuat kesamaan pandangan antara produsen pangan skala kecil baik darat maupun laut. Di sisi lain, kami berharap dapat menawarkan pandangan tentang cara-cara tertentu di mana para nelayan menghadapi tantangan transformasi sistem pangan: Bagaimana membangun ekonomi pangan lokal dan lestari? Bagaimana memastikan bahwa penjagaan ekologi dan produsen pangan skala kecil memiliki akses dan kendali atas sistem pangan berbasis atas tanah dan air? Bagaimana cara memastikan bahwa pekerja yang bergerak di sektor pangan dihargai dan mendapatkan keadilan? Tentunya ketika mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami dihadapkan pada tantangan yang tidak hanya berupa ketimpangan ekonomi yang harus diatasi, tetapi

juga bentuk penindasan yang berbasis gender dan rasial yang menyebabkan hambatan untuk adanya perubahan terhadap kenyataan politik, ekonomi, sumber daya alam dan tenaga kerja dalam sistem pangan.

Sebagai upaya untuk berkontribusi terhadap gagasan kongkrit dalam mengatasi tantangan dan kesenjangan pengetahuan yang dijelaskan di atas, kami mendalami tiga bentuk kasus yang mengungkap dimensi kunci atas kedaulatan pangan dalam komunitas nelayan: (i) Mengubah ekonomi pangan dan pengalaman penjualan langsung atas hasil tangkapan perikanan nelayan skala kecil di Turki, (ii) Pertahanan sumber daya alam: gender dan wilayah perikanan dalam perikanan nelayan skala kecil di Indonesia, (iii) Buruh tenaga kerja dalam sistem pangan; migrasi dan perikanan di Eropa dan Afrika Barat. Meskipun diharapkan dapat berkontribusi pada perdebatan yang lebih luas, informasi mendalam dari berbagai wilayah yang berbeda pada saat yang sama menunjukkan keragaman dan kekhususan dari perjuangan perikanan nelayan skala kecil berdasarkan situasi konteks lokal.

3.1 Transformasi dan relokalisasi ekonomi pangan

Para akademisi dan aktivis telah menyuarakan ke-waspadaan tentang kegagalan ekonomi pangan global yang saat ini selama sejak beberapa dekade.⁴⁴ Dari kerusakan ekologis yang ditimbulkannya, keterasingan dan perusakan sumber penghidupan produsen pangan pedesaan, hingga jarak dan kurangnya transparansi antara konsumen dan pangan yang mereka beli. Pangan telah diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dijalankan dengan perjanjian perdagangan bebas yang kemudian mendorong produksi pangan tertentu untuk diarahkan pada pasar ekspor. Pendekatan yang digerakkan oleh pencarian keuntungan dari produksi korporasi pangan skala industri, dengan kepercayaan buta pada pasar bebas, telah memusatkan kendali produksi pangan di tangan beberapa pelaku korporasi dan perantara, membuat banyak masyarakat menjadi rentan terhadap kerawanan pangan kronis atau akut. Rantai pasokan pangan dengan jarak jauh juga sangat rentan terhadap gangguan, sebagai contoh akibat dari krisis iklim atau kesehatan, yang semakin sering terjadi —seperti yang baru-baru ini ditunjukkan dengan munculnya wabah Covid-19. Sejak semakin

banyaknya nelayan skala kecil dan produsen pangan skala kecil di dunia dipaksa untuk bergantung pada ekspor dan rantai pasokan pangan jarak jauh, merencanakan sebuah perubahan menuju sistem pangan yang demokratis, lestari, adil dan melokal merupakan tantangan yang luar biasa. Namun, sebagaimana kerja yang telah dilakukan dalam arus ini dilakukan oleh Aliansi masyarakat sipil internasional menunjukkan mayoritas produsen pangan skala kecil bergantung pada apa yang mereka definisikan sebagai "pasar berdasarkan wilayah".⁴⁵ Ruang-ruang ini menghubungkan populasi penduduk di perkotaan dan pedesaan, dan menyediakan proses pertukaran antara konsumen dan penyedia pangan dalam satu kawasan wilayah biologis mereka.

Mendorong pasar semacam itu juga bisa menjadi strategi kunci yang baik guna memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan pendapatan produsen pangan, merebut kembali kekuasaan dari perantara/tengkulak, dan menjaga serta mempertahankan sumber penghidupan yang lebih bermartabat. Ditambah lagi, kedekatan dengan produsen pangan dapat memberikan kemungkinan



Gambar 7 – Anggota koperasi Istanbul Birlik. Foto oleh Zoe. W. Brent

kepada konsumen untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana mereka dihasilkan, apa peran mereka dalam sistem pangan yang adil dan lestari, dan untuk memilih makanan mereka atas dasar masalah ekologi juga. Pertanian yang didukung masyarakat dan pasar lokal adalah beberapa bentuk umum yang mendapat perhatian luas dari para aktivis kedaulatan pangan. Inisiatif yang mendorong konsumsi ikan lokal, seperti La Platjeta dari Barceloneta⁴⁶, dan pasar lokal seperti lelang langsung (*subhasta cantada*) yang sampai saat ini masih berjalan seperti di Catalonia di Montgat adalah suatu contoh dari beberapa praktik yang terlihat saat ini di sektor perikanan.

Perikanan skala kecil di Turki dan pengalaman Istanbul Birlik⁴⁷

Keadaan nelayan kecil Turki misalnya telah menjadi ironis, mengancam kelangsungan hidup ekonomi dan fisik mereka. Penangkapan ikan berlebihan dan melanggar hukum (*illegal*) telah menyebabkan menurunnya stok dan biota ikan yang penting. Polusi karena tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta pengendalian lingkungan yang tidak memadai, telah berkontribusi pada penurunan stok persediaan ikan dan bencana hilangnya keanekaragaman hayati, terutama di Laut Marmara.⁴⁸ Akhirnya, struktur pemasaran dari ikan dan pangan dari laut telah

Namun, secara umum, cara nelayan mengelola untuk terlibat dengan wilayah pasar kedaerahan lokal dan ekonomi pangan terlokalisasi serta hambatan yang mereka hadapi, masih kurang dipahami dengan baik. Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan untuk menciptakan pasar alternatif bagi produsen pangan skala kecil telah menjadi agenda yang mendesak untuk dilakukan. Dan membangun koperasi perikanan skala kecil di banyak daerah merupakan agenda sosial dan politik yang penting untuk memperkuat sistem pangan lokal, dan kelestarian dari stok ikan.

menjebak banyak nelayan kecil dan koperasi nelayan kecil dalam siklus hutang yang luar biasa menumpuk. Pasar ikan dan pangan dari laut saat ini didasarkan pada perantara atau tengkulak (serta bisnis usaha ikan yang lebih besar terkonsentrasi pada segelintir orang) yang memanfaatkan kekuatan pasar mereka untuk menekan nelayan skala kecil agar menerima harga yang sangat rendah, yang pada akhirnya mengarahkan ke pada jurang utang yang dalam. Akibat dari berbagai tekanan tersebut, nelayan skala kecil terus menerus semakin terpinggirkan.

Generasi muda kehilangan minat untuk menjadi nelayan, dan negara serta masyarakat sipil sebagian besar tidak peduli tentang identitas dan budaya nelayan.

Dalam menghadapi kondisi yang sulit ini, perikanan nelayan skala-kecil mengangkat suara mereka dan menyoroti peran perikanan dalam pembangunan ekonomi pangan lokal. Asosiasi Koperasi Perikanan Tangkap Istanbul (selanjutnya akan disebut "Istanbul Birlik"⁴⁹) mewakili sebagian dari suara-suara tersebut. Asosiasi ini mewakili 34 koperasi perikanan dengan jumlah anggota mencapai sekitar 2.500 yang sebagian besar terdiri dari nelayan skala kecil di sekitar wilayah Istanbul di Turki. Didirikan pada tahun 1980, dan daerah penangkapan ikan anggotanya sebagian besar berada di sepanjang garis pantai Laut Marmara atau Laut Hitam (Barat Daya).⁵⁰ Mereka berpartisipasi dalam pertemuan FAO (Organisasi Pangan Dunia) dan IPC (Komite Perencanaan Internasional untuk Kedaulatan Pangan, sebuah organisasi politik global yang bersatu untuk memajukan agenda kedaulatan pangan di tingkat internasional) serta pertemuan dengan organisasi lain yang memperjuangkan kedaulatan pangan seperti La Via Campesina, dan memainkan peran penting mewakili gerakan nelayan regional dan global di ruang lingkup internasional.

Istanbul Birlik juga merupakan bagian dari SÜR-KOOP, yang merupakan perkumpulan pusat tingkat nasional dari koperasi perikanan tangkap di Turki. Didirikan pada tahun 2004, SÜR-KOOP terdiri dari 15 anggota regional. Istanbul Birlik adalah salah satu anggota regional dari SÜR-KOOP yang sangat aktif, yang memiliki 243 koperasi yang mewakili sekitar 19.000 anggota nelayan.⁵¹ Namun, SÜR-KOOP terdiri dari kedua skala nelayan dari skala industri besar dan nelayan skala kecil. Oleh karena itu, masing-masing daerah memiliki ciri khas, serta kedudukan dan kegiatan politiknya masing-masing.

Secara historis, nelayan skala industri dan koperasi perikanan skala industri telah menjadi aktor yang berpengaruh secara ekonomi dan politik di Turki. Mereka aktif dalam berbagai pertemuan dengan para pembuat kebijakan, terutama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Budidaya di bawah Kementerian Pertanian dan Kehutanan. Namun, nelayan skala kecil sebelumnya kurang terwakili dalam ruang dan proses tersebut. Partisipasi aktif dan pengorganisasian koperasi nelayan skala kecil telah membuat mereka lebih kuat dan lebih terlihat ke publik terutama sejak 2012, 'ketika sekitar 200 nelayan Istanbul Birlik menghadiri pertemuan perikanan di Ankara yang mengejutkan para nelayan skala besar



Gambar 8 – Pelabuhan perikanan di Istanbul. Foto oleh Istanbul Birlik

dan pembuat kebijakan. [...] Ini adalah pertama kalinya pertemuan semacam itu dihadiri oleh organisasi nelayan skala kecil.⁵²

Di Turki, panjang kapal nelayan skala kecil biasanya mencapai antara 5 sampai 12 meter. Sebagian besar adalah perahu kayu menggunakan jaring insang dan / atau rawai. Kapal penangkap ikan skala kecil berjumlah 90% dari total armada penangkapan ikan nasional, tetapi total tangkapan

Perkembangan politik nasional dan internasional Istanbul Birlik

Istanbul Birlik didirikan pada tahun 1980, tetapi sangat aktif khususnya dalam dekade terakhir. Para saat ini, Istanbul Birlik memiliki fokus perhatian pada pembangunan kapasitas anggotanya, berpartisipasi dalam sirkulasi berbagai aktivitas sosial dan politik, dan membangun aliansi dengan aktor sosial lainnya seperti perguruan tinggi, LSM, pemerintah kota dan jurnalis untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi sebagai komunitas perikanan nelayan skala kecil. Pemilihan dewan dan ketua terbaru dari Istanbul Birlik pada tahun 2011 merupakan langkah kunci dalam proses tersebut. Kepemimpinan baru mengambil pendekatan yang lebih aktif, fokus pada pembangunan komunitas, partisipasi aktif dalam ruang pengambilan keputusan, mendefinisikan tujuan struktural dan politik, dan memperkuat komunikasi antar nelayan dari koperasi yang berbeda; dengan pembuat kebijakan di tingkat administratif yang berbeda; dan dengan aktor sosial lainnya seperti peneliti, LSM, jurnalis, dan pemerintah kota.

Dalam masa periode saat ini, konflik antara nelayan skala kecil dan usaha perikanan industri juga semakin terlihat jelas, terutama dalam perdebatan tentang hukum perundang-undangan yang mengatur jarak hukum dari pantai tempat pukat cincin dan pukat trawl diperbolehkan menangkap ikan. Pada 3 November 2011, kapal pengguna alat tangkap pukat cincin dan pukat trawl mengadakan protes di Selat Bosphorus, dengan menggunakan kapalnya, yang mengklaim bahwa mereka harus diizinkan untuk menangkap ikan lebih dekat ke garis pantai. Sementara itu, nelayan skala kecil dan LSM seperti Greenpeace dan Slow Food Istanbul (Fikir Sahibi Damaklar) secara terbuka mengancam kapal pukat trawl yang menangkap ikan secara ilegal di Bosphorus, serta penjualan ikan kecil yang ditangkap secara ilegal.⁵⁴ Kelompok pelaku bisnis usaha perikanan skala besar dan pengusaha tengkulak kuat lainnya berkolusi secara erat dalam jaringan yang terorganisir dengan baik, yang selama ini menggunakan taktik yang semakin agresif dalam mempertahankan kepentingan

mereka biasanya kurang dari 10% dari total hasil sektor perikanan.⁵³ Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tangkapan yang diperoleh nelayan industri dengan hasil tangkapan nelayan skala kecil. Perbedaan ini juga menimbulkan bentuk dari suatu perbedaan dramatis dalam dampak lingkungan dan tekanan pada populasi ikan yang disebabkan oleh kedua kelompok subsektor perikanan tersebut.

mereka yang dilaporkan oleh surat kabar lokal dan dibahas di forum nelayan selama penelitian lapangan kami. Intimidasi dan paksaan kekerasan ditujukan kepada kelompok-kelompok pembela lingkungan yang vokal, termasuk komunitas perikanan nelayan skala kecil, pembela ekologi, kelompok konsumen, dan LSM. Taktik intimidasi ini bahkan termasuk penyerangan terhadap kepala koperasi di Istanbul.⁵⁵

Dalam lingkungan seperti itu, kerja bersama dari Istanbul Birlik dengan berbagai aktor masyarakat sipil — termasuk LSM seperti Greenpeace dan Slow Food; kelompok konsumen; koki restoran; jurnalis; dan akademisi dari berbagai bidang termasuk biologi, ekonomi perikanan, sarjana teknik perikanan tangkap dan budidaya, serta ilmu sosial — meningkatkan visibilitas mereka dan membantu memperkuat suara mereka di berbagai ruang politik dan sosial. Istanbul Birlik mengatur kampanye bersama dengan berbagai organisasi lain yang meliputi: (i) kampanye melawan penangkapan ikan ilegal untuk mencegah penangkapan dan penjualan ikan kecil dengan slogan, yang dipromosikan oleh Greenpeace, “Berapa sentimeter milik Anda?”⁵⁶, dan (ii) sebuah kampanye tahun 2011-2015⁵⁷ untuk melindungi ikan Bosphorus yang secara tradisional dan budaya sangat penting yang biasa disebut “lüfer” dengan slogan “tim pelindung Lüfer”.⁵⁸

Secara internal, Istanbul Birlik juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas di antara para anggotanya yang masih terus berjalan. Setiap tahun mereka menyelenggarakan 2-3 lokakarya yang dihadiri oleh badan pengurus koperasi yang berpartisipasi untuk berbagi informasi dengan anggota koperasi mereka sendiri. Lokakarya tersebut bertujuan untuk: memperbaiki pengelolaan struktur kepengurusan koperasi dengan berbagi prinsip, struktur hukum dan tanggung jawab koperasi; mempromosikan perikanan lestari; dan berdiskusi tentang bagaimana memperbaiki keadaan anggota mereka. Perbaikan-perbaikan ini dipahami baik dari segi infrastruktur dan fasilitas yang

diberikan kepada anggota nelayan, tetapi juga melalui upaya melindungi identitas dan budaya perikanan nelayan skala kecil. Dengan pertemuan dan organisasi otonom itu, mereka telah menciptakan sistem pembelajaran antar nelayan guna memperkuat kolaborasi di antara anggota Istanbul Birlik, dan mengembangkan struktur organisasi internal mereka. Sementara itu, mereka juga memperbolehkan koperasi dan anggotanya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi lebih dekat dengan berbagai peneliti dan profesor di berbagai universitas. Nelayan bisa mendapatkan masukan dan dukungan dari akademisi dengan bertukar pikiran tentang berbagai topik termasuk struktur

hukum, aktivisme koperasi, hubungan perikanan dan budidaya, plastik yang berada laut, dan Perumbuhan Biru dan berbagai isu lainnya.

Terlepas dari dominasi ekonomi dan politik dari perusahaan perikanan skala industri, Istanbul Birlik telah berhasil membuat nelayan kecil dapat lebih terpendang oleh publik dalam dekade terakhir. Selama periode ini, mereka memperoleh pengakuan sebagai aktor penting di sektor perikanan, dan perlahan-lahan memasuki diskusi tentang amandemen dari undang-undang perikanan nasional, yang diperbarui setiap 4 tahun dimana yang terakhir berlaku hingga 31 Agustus 2020.

Keterikatan dengan gerakan kedaulatan pangan lainnya

Istanbul Birlik telah memperkuat kolaborasinya di Turki, organisasi ini juga beraliansi dengan jaringan internasional yang ada untuk membangun hubungan baru. Aktivisme internasional dan upaya pembangunan jaringan ini telah membantu meningkatkan kesadaran tentang tantangan perikanan dalam gerakan internasional yang lebih luas untuk kedaulatan pangan dan agroekologi, memperkuat suara politik perikanan nelayan skala kecil, dan memunculkan peluang baru untuk bekerja bersama.

Setelah berpartisipasi dalam Kolokium Internasional tentang Inisiatif dalam Studi Agraria Kritis dan lokakarya

perampasan laut yang diadakan di Vitoria / Gasteiz di Negara Bagian Basque pada bulan April 2017, Istanbul Birlik kemudian menyelenggarakan lokakarya dari organisasi perikanan nelayan skala kecil dari Eropa pada bulan September. Organisasi-organisasi perikanan nelayan skala kecil yang berpartisipasi meliputi anggota regional Eropa dari WFFP termasuk perwakilan dari Spanyol (Asociación Profesional de Autónomos del Mar), Prancis (Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française), Platform masyarakat adat Rusia (Aborigin Forum) dan perwakilan nelayan skala kecil Sápmi (Dewan Saami). Lokakarya ini menjadi momen



Gambar 9. Desain Toko Mitra Kerja seluas 200 m² dengan tempat yang cocok untuk menjual, mengolah, memasak dan memakan ikan serta untuk kegiatan budaya (Sumber: Poster kampanye “Ketahu Nelayanmu”)

penting untuk memfasilitasi pemahaman mendalam yang lebih komprehensif mengenai berbagai permasalahan dan perjuangan yang dialami para nelayan di seluruh Eropa, dan mendorong para nelayan untuk mencari cara untuk mencari cara berkolaborasi lebih lanjut dengan ruang komunitas internasional. Kolaborasi erat ini membawa Istanbul Birlik menghadiri Sidang Umum ke-7 WFFP yang diadakan di New Delhi, India, di mana WFFP merayakan ulang tahun ke-20. Dalam Sidang Umum ini, Istanbul Birlik

menjadi anggota WFFP, bergabung dengan lebih dari 50 perwakilan negara lainnya. Aliansi lintas-bangsa dan negara ini merupakan sumber inspirasi bagi Istanbul Birlik dalam hal ide-ide baru (misalnya, kedaulatan pangan dan agroekologi), struktur organisasi, atau bahkan hal detail yang bersifat prosedural seperti bagaimana menjalankan pertemuan yang efektif dan bagaimana memastikan partisipasi dari beragam bentuk pemangku kepentingan⁵⁹.

Menempatkan gagasan ke dalam praktik: Model Penjualan Langsung dan Toko Mitra

Menghadapi krisis ekologi dan sosial di wilayah mereka, terutama dengan menurunnya stok ikan dan tingginya tingkat hutang nelayan skala kecil yang tinggi kepada tengkulak atau perantara, Istanbul Birlik telah memulai sebuah proyek baru yang berfokus pada "Model Penjualan Langsung". Model ini bertujuan untuk meningkatkan posisi nelayan atas ikan yang mereka tangkap dan pangan yang mereka berikan kepada konsumen. Alih-alih bergantung pada tengkulak atau perantara yang membeli ikan dengan harga yang sangat murah dan menambahkan komisi di beberapa titik di sepanjang rantai nilai hingga mencapai konsumen akhir di supermarket, toko ikan atau restoran, mereka bermaksud untuk membangun jaringan penjualan langsung. Hal ini akan memberikan baik berupa nilai tambah lebih bagi nelayan sebagai produsen dan penyedia ikan dengan harga yang lebih murah bagi konsumen akhir, membantu membuat ikan lebih mudah diakses oleh kelompok orang miskin dan kelas pekerja berpendapatan rendah. Menurut pimpinan Istanbul Birlik, model tersebut akan membantu mengubah persepsi dominan dalam sistem pasar kapitalis saat ini: "orang akan memandang ikan bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai makanan".⁶⁰

Model Penjualan Langsung yang direncanakan mencakup pembukaan Toko Mitra Kerja (*Co-op Shops*) (lihat Gambar 9) di berbagai distrik atau tingkat kecamatan di Istanbul. Ikan yang ditangkap oleh nelayan anggota Istanbul Birlik, akan dibeli oleh koperasi itu sendiri dengan harga tetap dan adil bagi nelayan. Istanbul Birlik akan memiliki sistem transportasi sendiri dengan truk berpendingin, dan ikan kemudian akan dijual di Toko Mitra Kerja yang menjadi mitra. Akses langsung ke pasar lokal ini akan meningkatkan ekonomi nelayan dan mengurangi ketergantungan mereka pada perantara yang saat ini menentukan harga ikan.⁶¹ Toko Mitra Kerja tidak hanya menyediakan pasar tetapi juga ruang untuk memproses, memasak, dan menjual produk perikanan yang bernilai tambah yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mempekerjakan terutama

perempuan dan kelompok muda guna memberi mereka lebih banyak visibilitas dan menawarkan lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan sektor perikanan skala kecil.

Sebagian dari ruang Toko Mitra Kerja akan digunakan untuk acara budaya seperti festival nelayan, seminar, pameran, kegiatan untuk anak-anak, dan debat. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran tentang tradisi perikanan nelayan skala kecil, biota lokal, karakteristik spesifik wilayah perairan laut (yaitu Laut Marmara Utara, Bosphorus, dan Laut Hitam Barat Daya) begitu juga ide-ide perikanan yang didukung masyarakat. Desain dan konstruksi ruang akan dikerjakan dengan bekerjasama



Gambar 10: Poster "Ketahu Nelayanmu"



Gambar 11 – perempuan mengolah ikan untuk makan siang, Tarakan, Indonesia. Foto oleh Zoe. W. Brent

dengan kelompok lain seperti inisiatif konsumen; peneliti; pemerintah kota; dan organisasi masyarakat sipil yang tertarik berpartisipasi.

Proyek ini pertama-tama bertujuan untuk memperbaiki keadaan nelayan skala kecil, dimulai dengan anggota koperasi Istanbul Birlik. Namun, pada saat yang sama, program kerja ini merupakan proyek yang lebih luas untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang laut, cara tradisional menangkap ikan, komunitas nelayan, serta dinamika dan aktor sosial di sekitar sistem pangan perikanan. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan pangan organik, agroekologis, dan / atau lokal yang berkembang pesat telah membantu masyarakat mendapatkan banyak manfaat untuk membangun kembali hubungan dengan produsen pangan skala kecil.⁶² Menghubungkan kembali masyarakat dengan nelayan tradisional dan skala kecil juga dapat memberikan banyak manfaat.⁶³ Nama program kerja ini - 'Ketahuilah Nelayanmu- (lihat Gambar 10) yang membahas hal ini.

Pengalaman program kerja Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Fisheries/CSF) dari Amerika Serikat dan kemungkinan untuk program kerja pemasaran pangan laut oleh Istanbul Birlik serta usulan Toko Mitra Kerja (lihat Gambar 9) menunjukkan bahwa nelayan skala kecil dapat meningkatkan pendapatan sebesar 30% dengan menerapkan model seperti itu.⁶⁴ Ini akan menjadi langkah penting untuk mengatasi keadaan ekonomi para nelayan yang terlilit hutang dan terpinggirkan. Untuk melaksanakan rencana ini, Istanbul Birlik telah bertemu dengan pemerintah kota / kabupaten selama setahun terakhir untuk mendapatkan bangunan dengan dukungan pemerintah kota dan juga untuk menghindari sewa bangunan yang terus menerus meningkat. Namun, walaupun program kerja ini penting sebagai upaya untuk menjamin tangkapan ikan tersuplai secara sehat dari lokal selama saat krisis ini masih berjalan, negosiasi dengan pemerintah telah terhenti semasa pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia.

Jaringan-Jaringan Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (CSF): aliansi dengan kelompok konsumen agroekologi dan pemerintah kota

Sejak pemilihan umum kota paling terakhir pada Musim Semi 2019, Istanbul Birlik terus menjangkau Pusat Perkotaan Metropolitan Istanbul (the Istanbul Metropolitan Municipality/IMM), yang bertujuan untuk menciptakan model Toko Mitra Kerja di 10 hingga 25 distrik. Pertemuan rutin berlangsung sepanjang tahun 2019 dan awal 2020 antara IMM, koperasi dan inisiatif konsumen agroekologi, serta koperasi nelayan untuk bersama-sama merancang pasar tersebut.

Hari ini, ada sekitar 30 kelompok konsumen agroekologi yang berada di wilayah Istanbul. Yang pertama adalah BÜKÖOP (Koperasi Konsumsi Universitas Bogazici) yang didirikan pada tahun 2009⁶⁵, yang kemudian diikuti oleh lainnya yang berkembang pesat terutama dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah aliansi potensial utama dalam proyek 'Kenali Ikanmu', dimana nelayan dan Istanbul Birlik bergabung dalam dialog dan debat tentang bagaimana menghubungkan inisiatif untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi, dan mengenai jenis struktur apa yang

memungkinkan dapat berjalan dalam konteks situasi di Istanbul.

Berbagai inisiatif warga dan konsumen tersebut terbentuk untuk belajar secara kolektif dan bekerja bersama guna membangun jaringan yang lebih luas dari Pertanian Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Agriculture/CSA) dan Perikanan Dengan Dukungan Komunitas (Community Supported Fisheries/CSF), sangat penting dalam gerakan menuju sebuah sistem pangan yang adil dan lestari secara sosial dan ekologis, berdasarkan kedaulatan pangan. Dengan demikian, proyek dan inisiatif Istanbul Birlik menunjukkan banyak kesamaan jalan antara nelayan Birlik dan petani agroekologi dan perdebatan di antara para aktivis kedaulatan pangan tentang bagaimana merelokalisasi ekonomi pangan. Baik di darat maupun di laut, ekonomi pangan alternatif ini lebih demokratis, layak secara ekonomi, lestari secara ekologis, dan sesuai dengan budaya.

3.2 Pertahanan sumber daya alam: Landasan transformasi sistem pangan

Sejak asal mula berkembangnya kapitalisme, pengusuran kaum petani dari tanah mereka telah menjadi kunci untuk memahami proses industrialisasi dari produksi pangan yang terus merusak produksi pangan skala kecil dan tradisional. Karena adanya berbagai literatur yang berkembang pesat tentang perampasan tanah telah menunjukkan bahwa proses perampasan ini bukanlah peninggalan masa lalu.⁶⁶ Sebaliknya, mereka adalah bagian integral dari sistem pangan yang dikendalikan korporasi usaha saat ini. Yang terpenting, proses-proses tersebut seringkali sangat tidak adil bahkan jika dilakukan melalui cara-cara "sah secara hukum" serta disetujui negara. Ditambah lagi proses tersebut juga terjadi di laut, menggusur para nelayan, dalam apa yang telah dijelaskan dalam literatur terkait advokasi sebagai "perampasan laut".⁶⁷ Ancaman pengusuran yang dihadapi oleh produsen pangan skala kecil sangat besar dan beragam. Melawan dan membatalkan perampasan sumber daya alam adalah bagian utama dari perjuangan kedaulatan pangan di seluruh dunia, yang bertujuan untuk menegakkan kembali kendali rakyat atas sumber daya alam yang dibutuhkan untuk produksi pangan.⁶⁸

Seperti kaum petani kecil yang menentang perampasan tanah, nelayan juga mengkonsolidasikan kampanye menentang perampasan sumber daya alam untuk mempertahankan wilayah mereka. Misalnya, sejak 2012, Gerakan Perempuan Nelayan dan Nelayan Tradisional (MPP) dan Komite Nelayan Penggembala (CPP) telah menggerakkan dan melakukan advokasi terhadap undang-undang federal yang akan melindungi hak nelayan tradisional kecil atas wilayah dan kedaulatan pangan. Berkat kampanye yang dilakukan dengan motto "Wilayah Tangkap Ikan: Keanekaragaman Hayati, Budaya dan Kedaulatan Pangan dari Rakyat Brasil" (port *Território Pesqueiro: Biodiversidade, Cultura e Soberania Alimentar do Povo Brasileiro*)⁶⁹ mereka mampu mengumpulkan lebih dari 250 nelayan laki-laki dan perempuan nelayan pada November 2019 selama *Grito de Pesca* tahun 2019, dan mengumpulkan sekitar 200.000 tanda tangan yang saat ini sedang diproses oleh Pemerintah Negara Brasil. Selama proses mobilisasi, mereka telah mempertahankan hak menangkap ikan, hak adat, hak wilayah teritorial, hak perempuan nelayan serta kedaulatan pangan dengan menghubungkan perdebatan dan perjuangan tersebut secara bersama-sama.⁷⁰

Menggabungkan wawasan dari berbagai kasus berbeda, membantu mengungkap berbagai pola kunci bentuk perampasan serta pelajaran dari perjuangan melawan perampasan tersebut. Namun, dampak dari ancaman tersebut tidak dirasakan secara merata oleh banyak orang. Perampasan sumber daya alam memperburuk ketimpangan yang telah ada terjadi di pedesaan, yang diciptakan oleh suatu bentuk persilangan dari berbagai penindasan gender, rasial dan etnis.

Di sini kami melihat lebih mendalam terhadap konsekuensi kekerasan berbasis gender dari perampasan tanah dan laut karena mobilisasi gerakan perempuan nelayan saat ini menunjukkan bahwa pemahaman ini juga penting untuk mendukung dan membingkai upaya perlawanan. Kaum perempuan petani pekerja secara sistematis tidak terlihat, peran mereka dalam pertanian sering dilihat sebagai istri seorang petani, dan seringkali kesulitan mengakses tanah dan kredit daripada rekan laki-laki mereka. Perempuan kaum petani cenderung menjalankan pertanian skala kecil, kurang berorientasi pada ekspor dan lebih berperan penting untuk memastikan ketahanan pangan komunitas mereka, namun perempuan secara tidak proporsional menanggung beban kelaparan di daerah pedesaan.

Proses serupa terjadi pada komunitas nelayan di seluruh dunia. Kegiatan yang berlangsung di atas perahu cenderung menjadi gambaran utama yang muncul di benak kita saat memikirkan kegiatan menangkap ikan. Hal tersebut juga merupakan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Namun, selain perempuan yang pergi melaut, ada banyak

tugas dan kerja saat sebelum dan sesudah panen hasil tangkapan terutama dilakukan oleh perempuan, yang menopang ekonomi perikanan lokal serta juga skala rumah tangga. Dari memperbaiki jaring dan peralatan tangkap, hingga menjaga buku keuangan, pengasuhan anak dan pelatihan kerja hingga pengolahan dan penjualan pemasaran ikan. Perempuan menduduki peran yang beragam dan penting dalam perikanan di seluruh dunia. Kontribusi ini penting untuk menopang rumah tangga, dan menjamin akses ke pola makan yang sehat bagi keluarga nelayan. Dan, sebagaimana telah diperkirakan oleh FAO (2015), nelayan skala kecil yang sebagian besar menjual hasil tangkapannya ke pasar lokal menyediakan sekitar dua pertiga dari hasil ikan tangkapan yang ditujukan untuk konsumsi secara langsung oleh manusia.⁷¹ Dilihat dari cara ini, komunitas nelayan kecil memainkan peran penting dalam sistem pangan yang sehat dan keputusan yang diambil tentang ikan di tingkat lokal: ikan mana yang bisa ditangkap, mana yang perlu tetap berada di perairan, alat tangkap apa yang akan digunakan, mana yang akan dikeringkan dan mana yang akan dimakan dengan segar, pasar mana yang akan dibeli, bagaimana membersihkan atau mengolahnya, dan resep mana yang harus disiapkan serta bagaimana cara memasak adalah semua komponen penting dari kedaulatan pangan. Perempuan khususnya, secara teratur membuat keputusan tersebut dan menjaga agar berbagai kegiatan tersebut terus berjalan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa perempuan adalah aktor kunci dalam perjuangan kedaulatan pangan di komunitas nelayan.



Gambar 12 – kampung nelayan di luar kota makassar, Indonesia. Foto oleh Thibault Josse

Gender dan kewilayahan dalam sektor perikanan Indonesia⁷²

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dimana menjadi nelayan adalah merupakan cara hidup dari lebih dari 6 juta orang. Selain itu, sekitar 85-90% dari total tangkapan dihasilkan oleh nelayan skala kecil.⁷³ Namun proyek infrastruktur berskala besar atas nama Revolusi Biru dari presiden Jokowi, yang berupaya menjadikan negara ini sebagai 'Poros Maritim Dunia', memberikan tekanan ketegangan terhadap akses nelayan kepada sumber daya kelautan dan merusak kedaulatan pangan di berbagai tempat-tempat tersebut. Dipicu penataan dan realokasi dari ruang laut di bawah semangat perencanaan tata ruang laut (*marine spatial planning*),⁷⁴ pasir dari dasar laut ditambang, dikirim

dan ditumpuk untuk menggambar ulang garis pantai Indonesia, membuat ruang untuk berbagai pelabuhan baru dan pusat penghubung logistik, pengembangan wisata dan pembangunan perumahan mewah. Proses yang mengubah ruang laut menjadi daratan pantai baru ini disebut reklamasi. Ketika pasir dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, arus laut terganggu, habitat ikan dihancurkan, dan para nelayan sendiri tergusur terpinggirkan untuk memberi jalan bagi infrastruktur baru yang ditempatkan untuk mengintegrasikan wilayah pinggirannya Indonesia ke dalam pusat jalur perdagangan dan transportasi serta juga menempatkan negara ke dalam ke posisi yang lebih baik untuk perdagangan global.

Makassar: Pusat pelayaran Indonesia yang meminggirkan nelayan tradisional

Makassar adalah salah satu dari kota pelabuhan besar yang diposisikan oleh Jokowi sebagai pusat logistik dan perdagangan di Indonesia. Dua proyek pembangunan infrastruktur utama yang saat ini sedang berjalan di wilayah tersebut adalah Makassar New Port (MNP, sebuah proyek strategis nasional yang dikelola oleh badan usaha milik negara pengelola pelabuhan, PT Pelindo IV) yang berorientasi pada pelayaran yang direncanakan akan mereklamasi daratan sekitar 1.428 ha; dan Central Point Indonesia (CPI, dikelola oleh perusahaan swasta pengembang pemukiman mewah PT Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Group, dengan jasa konstruksi yang disediakan oleh perusahaan Belanda, Boskalis⁷⁵), yang mengusulkan untuk mereklamasi 156 ha yang difokuskan untuk pariwisata. Untuk mencegah protes terhadap proyek reklamasi CPI, sebuah masjid besar telah dibangun di lokasi tersebut, yang akhirnya mengurangi perlawanan terhadap pembangunan CPI. Namun, seperti yang kami telusuri dalam penelitian lapangan kami, MNP telah menjadi target gerakan protes yang masih terus berjalan yang dilakukan oleh nelayan dan aliansinya.

Pembangunan dari proyek MNP membuat para nelayan tidak dapat mengakses daerah penangkapan ikan dan wilayah pesisir yang menjadi kunci dari sumber penghidupan dari masyarakat setempat, seperti di sekitar Desa Tallo, Sengka, Batu dan Buloa. Di sini, seperti di semua komunitas nelayan, peran perempuan dalam ekonomi

perikanan lokal sangat penting. Salah satu kegiatan memancing yang hanya dilakukan oleh perempuan: memanen kerang, lingula, dan tiram di tepi laut. Konon katanya, perempuan bekerja di seluruh rantai nilai, mulai dari memanen mengumpulkan kerang, mencuci dan membawanya hasilnya ke pasar. Mereka juga terlibat dalam kegiatan pasca panen dari hasil tangkapan ikan oleh nelayan laki-laki yang menggunakan perangkat untuk menangkap kepiting, yang sebagian besar dicuci dan dijual oleh perempuan. Selain itu, mereka juga mengeringkan ikan dan udang. Dengan adanya pembangunan proyek seperti CPI dan MNP, perempuan nelayan memiliki akses yang terbatas terhadap bahan baku sumber daya ikan dan saat ini dibiarkan tanpa akses sumber daya yang selama ini menjadi sumber penting bagi penghasilan mereka.

Pembangunan MNP yang dimulai pada tahun 2017 telah dituangkan ke dalam tata ruang laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; RZWP3K) yang disetujui dengan minimnya konsultasi dan keterlibatan dari para nelayan, padahal proses yang dijanjikan dilakukan secara partisipatif. Konstruksi dari bangunan di laut telah menimbulkan pencemaran di pantai dan peningkatan lumpur dan terkikisnya pantai karena gelombang yang membawa partikel yang lebih besar dari proses reklamasi memaksa nelayan harus pergi lebih jauh untuk menangkap ikan.

Dampak gender terhadap pembangunan infrastruktur

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama terkena dampak negatif dan tereklusi dari tempat mereka menangkap ikan dan mengumpulkan kerang. Khususnya perempuan, akhirnya menanggung beban dari berbagai dampak tambahan yang terjadi. Kita bisa melihat ini dalam kaitannya dengan peran produktif perempuan (kegiatan yang menghasilkan suatu penghasilan, kesempatan kerja, pekerjaan berbayar), begitu pula terkait dengan peran mereka dalam reproduksi sosial (yang dapat terbagi dalam dua kategori: pekerjaan rumah tangga domestik dan kerja perawatan keluarga untuk mereproduksi orang/pekerja serta menjamin reproduksi dari sistem dimana orang/pekerja tersebut tinggal).

Pertama, dari segi produksi ekonomi, menurut perempuan nelayan di Tallo, jumlah kerang yang mereka kumpulkan telah menurun menjadi setengah dari dua karung keranjang yang menghasilkan penghasilan sekitar Rp 100.000 - Rp 120.000 / hari yang menurun menjadi satu karung senilai Rp 50.000 / hari. Beberapa nelayan telah berhenti mengumpulkan kerang sama sekali, karena mereka tidak memiliki akses ke daerah penangkapan mereka lagi, dan oleh karena itu tidak ada lagi kemungkinan untuk menangkap ikan atau memanen kerang lagi. Artinya, perempuan nelayan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai pekerja gudang informal di mana mereka dipekerjakan sehari-hari dengan upah Rp 80.000 / hari. Situasi serupa dapat diamati di Jakarta dan Surabaya, di mana proyek

infrastruktur besar juga berdampak terhadap gender. Fadhilah Trya Wulandari mewawancarai perempuan pengumpul kerang di Muara Baru dan Kali Baru, dalam konteks proyek reklamasi di Teluk Jakarta (termasuk tanggul laut yang menutup Teluk Jakarta untuk menghindari banjir). Dia memperhatikan bahwa terjadi peningkatan biaya operasional oleh para perempuan nelayan setelah proyek reklamasi dijalankan sebagai akibat bertambah jauhnya jarak dan lokasi dilakukan pengolahan kerang serta tempat penjualan kerang.⁷⁶ Sejalan dengan itu, perempuan nelayan juga mengalami suatu penurunan penghasilan, karena pencemaran air mengubah laju pertumbuhan kerang rerata menjadi lebih kecil. Perempuan nelayan dibayar tergantung pada jumlah kilogram kerang yang mereka kumpulkan, jadi semakin kecil kerang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan satu kilogram kerang.

Kedua, dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi sosial dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan perempuan nelayan. Dampak keuangan umumnya dipikul oleh perempuan yang secara tradisional dipandang sebagai pengelola keuangan keluarga. Menurunnya penghasilan diantara keluarga nelayan menyebabkan bertambahnya hutang. Beberapa anak mereka putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah lagi. Lebih buruk lagi, perkawinan anak di bawah umur (karena putus asa ekonomi) semakin sering



Gambar 13 – Perempuan nelayan membahas strategi pengorganisasian. Foto oleh Zoe. W. Brent

terjadi sebagai cara untuk mendapatkan mas kawin dan menghilangkan tekanan keuangan dari keluarga. Secara tradisional, perempuan dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembukuan keuangan rumah tangga, jadi, tekanan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan yang sulit ini jatuh terutama di pundak perempuan nelayan.

Karena kurangnya akses ke zona penangkapan ikan menyebabkan kehilangan sumber penghidupan mata pencaharian nelayan, ini dapat memicu apa yang dapat dilihat sebagai krisis maskulinitas dalam suatu konteks di mana peran gender patriarki tradisional mengasumsikan bahwa laki-laki menghasilkan uang paling banyak. Karena hal ini dianggap tidak mungkin, wawancara dengan pendamping komunitas lokal melihat bahwa frustrasi dan tekanan terus meningkat, seperti juga memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Patriarki yang dilembagakan

Solidaritas Perempuan (SP), berpendapat bahwa proses penataan rencana tata ruang laut di Indonesia telah dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan logika patriarki. "RZWP3K (Bagian dari Rencana Tata Ruang Laut) adalah mengalokasikan ruang untuk berbagai sektor yang berbeda. Siapa yang paling dipentingkan dalam hal ini? Beberapa rakyat yang akan kalah. Di Indonesia ada prioritas patriarki - proyek infrastruktur besar. Tapi bagi kita, menciptakan pekerjaan bagi perempuan di komunitas nelayan harus menjadi sebuah prioritas, tapi hal tersebut tidak terlihat. Perempuan tidak terlihat dan oleh karena itu akan kalah."⁷⁷

Sangat jelas, kurangnya pengakuan terhadap perempuan ini telah dilembagakan oleh negara dan juga dalam komunitas mereka sendiri. Perempuan secara hukum, resmi terdaftar di KTP mereka sebagai istri dari nelayan, bukan sebagai nelayan itu sendiri, walaupun jika mereka juga pergi melaut dan / atau berkontribusi dalam banyak hal untuk ekonomi perikanan setempat. Pilihan program asuransi dan keuangan publik tidak mengakui perempuan sebagai nelayan sehingga mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah. Perempuan harus sudah memiliki akta nikah untuk dapat mendapatkan warisan harta benda, dan hal ini hanya mungkin jika mereka menjadi janda, jika tidak, mereka tidak dapat memiliki harta benda. Dan dalam proses konsultasi terbatas yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Makassar (RZWP3K), perempuan tidak diundang dan tidak dapat memberikan masukan karena mereka tidak diakui sebagai pemangku

Terakhir, kerja emosional yang sering kali tak dilihat dalam menjaga hubungan sosial dan kohesi antar tetangga, serta struktur dan norma di komunitas, yang umumnya dilakukan oleh perempuan, juga terkena dampaknya. Menurut perempuan nelayan yang diwawancarai, ada beberapa LSM lokal di sekitar Makassar yang mendorong iming-iming kepada nelayan untuk mengambil ganti rugi kompensasi dari pemerintah karena terjadinya dampak negatif dari MNP. Sayangnya, jumlah yang ditawarkan cukup rendah - sekitar 1 juta rupiah, dan ironisnya para perempuan tersebut tidak diajak berkonsultasi. Nelayan lain secara langsung menolak kompensasi. Lebih lanjut, hal ini menyebabkan ketegangan di dalam komunitas, yang menurut tuturan para perempuan pada akhirnya harus mereka kelola. Situasi serupa terjadi di sektor pertanian di mana keputusan yang seringkali diambil oleh laki-laki pemegang hak atas tanah terkait kepentingan hasil dan praktik pertanian profesional yang memberikan prioritas lebih daripada pentingnya ketahanan pangan dan tenaga kerja reproduksi sosial.

kepentingan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa kepala dari keluarga adalah laki-laki. Jadi menurut Kurniawaty (SP), "hukum itu sendiri dan kebijakan khusus terkait perikanan masih bersifat patriarki."⁷⁸ Pada saat yang sama, suami mereka sendiri dan laki-laki lain di komunitas, sering mengklaim bahwa perempuan tidak dibutuhkan dalam proses tersebut. Dengan demikian, seperti kebanyakan kaum perempuan petani, perspektif perempuan nelayan tradisional menjadi tidak dipertimbangkan dan kontribusi penting mereka menjadi tidak terlihat. Tentu saja, apa yang mereka lakukan adalah fundamental bagi kehidupan, namun, "Pelabuhan baru bukanlah tentang kehidupan, ini tentang bisnis besar."⁷⁹

Logika pembangunan kapitalis semacam ini yang mendorong infrastruktur pesisir besar-besaran untuk meningkatkan akumulasi modal juga memiliki implikasi ekologis yang serius. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan oleh Buckingham-Hatfield (2000), "perempuan secara tidak seimbang telah dipengaruhi oleh dampak lingkungan yang negatif karena peran sosial dan domestik mereka dan penyeban terbesar dari kemiskinan yang lebih besar."⁸⁰ Seperti yang ditunjukkan oleh Kurniawaty dari SP dan analisis Wulandari, degradasi lingkungan adalah suatu bentuk diskriminasi, bagian dari suatu sistem yang menindas, dilembagakan oleh kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur berskala besar dengan tetap tidak memperhatikan hak dan kebutuhan perempuan.

Mobilisasi dan jalan ke depan

Proyek-proyek tersebut tidak hanya memiliki dampak terkait gender, tetapi juga reaksi dan mobilisasi gender dengan meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam organisasi nelayan.⁸¹ Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) dibentuk pada tahun 1992, mendukung mobilisasi gerakan perempuan dan memberikan pelatihan kepemimpinan feminis di 11 kantor perwakilannya di seluruh Indonesia. Visi dari SP adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang demokratis, berdasarkan prinsip keadilan, kesadaran ekologis, penghormatan terhadap kemajemukan, dalam sistem yang setara mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, di mana mereka dapat secara adil berbagi akses dan kontrol atas alam, sosial, sumber daya budaya, ekonomi dan politik.

Di lapangan, SP memiliki 76 anggota individu di Makassar, dan bekerja terutama di komunitas nelayan seperti Tallo yang sedang menghadapi dampak pembangunan MNP. Mereka menggunakan pendidikan populer dan riset aksi untuk menganalisis dampak terhadap gender di Indonesia, dan memperkuat kapasitas perempuan agar mereka dapat melawan berbagai permasalahan yang dijelaskan disini. Metodologi penelitian yang mereka gunakan memprioritaskan ruang khusus perempuan di mana mereka berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang terjadi di komunitas dan secara khusus untuk memahami perspektif pandangan perempuan, tanpa laki-laki melanggar masuk ruang bicara perempuan. "Kalau kita ingin membuat kelompok kerja, yang terpenting untuk

bekerja lebih mudah, kalau perempuan berkelompok dengan laki-laki, maka kita (perempuan) tidak akan didengar. Kami membutuhkan kelompok kami sendiri."⁸² Kelompok-kelompok tersebut secara hati-hati mengumpulkan data dan informasi tentang proses pembangunan pelabuhan MNP dan dampaknya untuk memperkuat kerja advokasi. Pertemuan komunitas yang diselenggarakan dengan cara ini, pada akhirnya membantu mengumpulkan data tentang dampak gender dari pembangunan infrastruktur besar sekaligus juga mendukung perempuan dalam mengorganisir dan membangun strategi untuk melawan kebijakan pembangunan infrastruktur besar, yang berakar kuat mendalam pada sebuah sistem kapitalis patriarki.

Secara khusus, anggota-anggota SP telah menganalisis bagaimana alat-alat kebijakan seperti perencanaan tata ruang laut (*marine spatial planning/MSP*) digunakan oleh pemerintah pusat dan provinsi untuk membenarkan dan melaksanakan proyek infrastruktur besar. MSP digambarkan sebagai sebuah alat yang netral untuk menyelesaikan konflik atas ruang laut, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh laporan terbaru tentang topik tersebut, terlihat jelas adanya bias gender dalam cara penerapan tata ruang laut di lapangan, dengan memanfaatkan budaya patriarki dan dinamika kelembagaan untuk meminggirkan perempuan dari proses pengambilan keputusan yang kemungkinan akan berdampak besar bagi mereka.⁸³ Jenis penelitian riset aksi partisipatif yang dituliskan ke dalam laporan ini telah membantu menciptakan metode untuk menggerakkan



Gambar 14 – Nelayan Perancis. Foto oleh Thibault Jossee



Gambar 15 – Foto oleh Thibault Josse

perempuan nelayan. Di satu sisi, mereka telah menciptakan tekanan kepada pemerintah dari luar lembaga, menyelenggarakan berbagai bentuk protes di hadapan pemerintah daerah, dengan ratusan perempuan untuk menyuarakan keprihatinan mereka. Dan di sisi lain, para pimpinan SP telah diundang ke dalam untuk memberikan pandangan masukan publik kepada pemerintah daerah untuk menegaskan dampak gender yang disebabkan oleh MSP.

Pada tahun 2015, “Aliansi Selamatkan Pesisir” dibentuk untuk mendorong proses gugatan di pengadilan terhadap pembangunan pesisir CPI. Pekerjaan ini diorganisir oleh

Walhi Sulawesi Selatan, dan kantor SP di Makassar (SP Anging Mammiri) bergabung bersama sebagai bagian dari organisasi SP untuk memperkuat peran perempuan akar rumput dalam aliansi. Kehadiran SP yang kuat di lapangan juga memungkinkan para anggotanya untuk menempatkan gender sebagai isu utama dalam koalisi, meningkatkan kesadaran LSM lainnya, yang mungkin kurang menyadari dinamika gender yang terjadi di tengah komunitas. Hal ini menempatkan isu gender di tengah pengorganisasian yang dilakukan masyarakat sipil, membantu secara perlahan menjawab masalah patriarki yang ada di dalam LSM serta juga membawa analisis feminis ke dalam kerja advokasi.

Implikasi bagi gender dan kedaulatan pangan

Perspektif kedaulatan pangan menyoroti cara-cara di mana produsen pangan skala kecil yang menjaga ekonomi pangan lokal tetap berputar dan masyarakat yang terpinggirkan diberi makan, yang tergusur dari tanah dan kewilayahan mereka demi perdagangan dan investasi global. Perspektif feminis yang diartikulasikan oleh SP sangat sesuai dengan visi kedaulatan pangan, yang menekankan pentingnya upaya untuk memprioritaskan sistem yang menjamin kehidupan dan martabat manusia. Menyoroti dimensi feminis dari agenda kedaulatan pangan menempatkan kehidupan dan kegiatan yang menjaga kehidupan seperti produksi pangan berada di tengah pengambilan keputusan. Analisis kedaulatan pangan yang sensitif terhadap gender membantu kita lebih memperhatikan leih mendalam khususnya terhadap

kehidupan dan kebutuhan dari perempuan dan peran mereka yang beragam dalam sistem pangan, mulai dari produksi pangan hingga penyediaan pangan. Hal ini memperjelas kebutuhan untuk melawan patriarki yang dilembagakan, yang tidak mengakui kontribusi penting tersebut, begitu juga patriarki yang ada di dalam komunitas dan organisasi masyarakat sipil. Meski banyak hal yang harus dilakukan, namun tujuan feminis tersebut semakin terlihat dalam gerakan agroekologi dan kedaulatan pangan, yang kemudian telah mengedepankan slogan seperti, “Tanpa feminisme tidak ada agroekologi”⁸⁴ dan aturan kesetaraan gender yang telah diterapkan untuk semua posisi kepemimpinan di dalam gerakan global seperti WFFP dan La Via Campesina, serta kampanye mereka melawan kekerasan terhadap perempuan di daerah pedesaan.⁸⁵

3.3 Buruh dalam sistem pangan

Persentase tenaga kerja buruh migran (terutama) di sektor industri primer seperti industri perikanan dan industri pertanian telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Banyak dari imigran yang bekerja di bidang pertanian — secara legal atau dengan eksploitasi atau tanpa kontrak — menderita kondisi kerja dan hidup yang buruk dan tidak adil.⁸⁶ Di Spanyol sebagai contoh, mantan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pangan telah menyerukan kepada pihak berwenang untuk "segera memperbaiki kondisi yang menyedihkan" dari para buruh migran⁸⁷, hanya untuk menghadapi keluhan dari pemilik industri pertanian yang menyangkal adanya "penyimpangan" dalam praktik perburuhan.⁸⁸ Di tengah perdebatan tersebut, tragedi serius terus bermunculan, seperti kematian Eleazar Blandón, seorang buruh tani kontrak waktu tertentu di Nikaragua, yang menderita sengatan panas saat memanen semangka di Murcia, Spanyol. Alih-alih memenuhi kebutuhannya, manajer lapangan mengabaikannya sampai akhirnya meninggalkannya dan membiarkannya di depan pintu klinik kesehatan terdekat.⁸⁹ Ketidakadilan ini semakin nyata mendalam selama pandemi Covid-19 karena ketergantungan sistem pangan Eropa pada tenaga kerja buruh migran, yang telah menghadapi politik perbatasan yang semakin kejam, perjalanan yang terputus karena adanya pembatasan diberlakukan atau dalam beberapa contoh kasus diperbolehkan meskipun terdapat risiko kesehatan yang serius.⁹⁰ Dalam industri perikanan, kasus kerja paksa dan pekerja

anak — yang sebagian besar korbannya adalah buruh migran — adalah juga suatu masalah yang hampir seluruhnya diabaikan oleh pembuat kebijakan dan industri.⁹¹

Berbagai kasus tersebut semakin menguatkan akan pentingnya menempatkan perjuangan atas kondisi perburuhan sebagai jantung dari upaya untuk membangun kedaulatan pangan dan agroekologi. Memang gerakan untuk keadilan pangan dan kedaulatan pangan "tidak dapat berkembang dalam sebuah sistem di mana pekerja pangan dikriminalisasi, dieksploitasi, dan menjadi kelaparan",⁹² dan karenanya tidak dapat mengabaikan perjuangan untuk hak-hak buruh dan hak-hak imigran. Pada saat yang sama, banyak aktivis kedaulatan pangan, kaum petani kecil, dan nelayan tradisional skala kecil berjuang melawan pelanggaran dan ketidakadilan hak-hak buruh ini, menjamin lapangan pekerjaan bagi semua pekerja tersebut dalam suatu sistem pangan alternatif, dan membangun aliansi yang diperlukan untuk gerakan politik konvergensi yang bertemu dalam satu titik daripada berhadapan-hadapan antara kalangan kaum petani kecil dan buruh tani yang akan jauh lebih sulit. Meskipun kami tidak berpura-pura memiliki jawaban atas berbagai tantangan tersebut, pertanyaan yang muncul di antara persimpangan antara migrasi dan perikanan di Eropa dan Afrika Barat memberikan titik terang mengenai beberapa tantangan, dinamika, dan peluang politik untuk mengubah hubungan buruh dalam proses membangaunan kedaulatan pangan.⁹³

Lintasan berulang atas pengusuran dan eksploitasi dalam Sektor Perikanan

Menurut beberapa catatan, sejak awal era tahun 1970-an, migrasi dari Afrika ke Eropa terjadi pada kapal pukat trawl besar. Mereka yang mampu membayar €2.500-3.000 Euro akan dapat membuat kesepakatan dengan pemilik kapal pukat trawl tersebut untuk membawa mereka ke Spanyol pada akhir musim penangkapan ikan, dan yang lainnya akan mencari kerja pembantuan sebagai buruh kerja di kapal pukat trawl dengan upah gaji yang lebih rendah (€ 500-1000 Euro) dengan jalan itu mereka menjadi penumpang gelap.⁹⁴ Yang lain lagi akan melintasi rute darat melalui gurun menuju perbatasan Spanyol di wilayah Ceuta dan Melilla. Namun gelombang arus migrasi telah berubah selama bertahun-tahun sebagai akibat dari meningkatnya kontrol atas perbatasan, dan eksternalisasi serta militerisasi perbatasan Uni Eropa yang dipimpin oleh Frontex, badan pengawas perbatasan dan penjaga pantai Uni Eropa, yang didirikan pada tahun 2004. Lebih lanjut, jalan masuk ke Eropa melalui Ceuta atau Melilla semakin menurun setelah kebrutalan

tahun 2005 yang dipublikasikan secara luas terhadap para migran yang mencoba melintasi perbatasan, dan penambahan tinggi pagar perbatasan dari 3 meter menjadi 6 meter. Kemudian peluang baru telah teridentifikasi jauh dan jauh ke arah selatan sepanjang garis pantai Afrika Barat dari titik dimana kapal dapat membawa migran menyeberangi laut Atlantik ke Kepulauan Canary. Kota Nouadhibou di Mauritania menjadi pusat transit penghubung, sampai pengawas perbatasan yang telah diperkuat mendorong upaya lebih jauh ke arah selatan ke Saint Louis di Senegal, Mbour, Joal, Casamance, dan pada akhirnya Guinea-Bissau.⁹⁵

Sejak tahun 2006 dan seterusnya, dengan dikoordinasi oleh Frontex, Uni Eropa mulai secara efektif mulai mensubkontrakkan tugas pengamanan perbatasannya ke negara-negara Afrika Barat, melalui operasi seperti Hera I, II, dan III, dengan harapan dapat menangkap orang dari titik langkah pertama perjalanan migrasi mereka. 'Melalui

kerjasama ini, negara-negara anggota Uni Eropa seperti Portugal, Italia dan Spanyol menyediakan 2 helikopter, 2 kapal dan sekitar 10 kapal patroli untuk Mauritania, Senegal, Gambia dan Cape Verde.⁹⁶ Saat patroli pengawasan diperketat, rute migrasi dari laut Atlantik ke Spanyol menurun dan pada tahun 2012 hanya 173 pendatang baru yang ditangkap. Jumlah ini tidak termasuk, bagaimanapun, ratusan, bahkan ribuan orang yang tidak selamat dalam perjalanan.⁹⁷ Namun, setelah titik ini, rute Laut Mediterania menjadi fokus baru, dan sekali lagi terdiversifikasi dan

berkembang pesat.⁹⁸ Banyak orang yang gagal melakukan perjalanan berbahaya melintasi Atlantik atau Mediterania untuk mencari pekerjaan dan peluang untuk menghidupi keluarga mereka (sekitar 28.000 kematian telah terdaftar di pusat data yang dikumpulkan Migrants' Files sejak tahun 2000, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak akan pernah terhitung).⁹⁹ Bagi mereka yang berhasil, mereka setibanya akan menghadapi rasisme terlembagakan, xenofobia, dan ancaman deportasi yang membatasi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak.

Memicu migrasi orang Senegal

Di tengah ketimpangan, perang dan konflik, pelanggaran hak asasi manusia serta berbagai bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia, bagi ribuan orang, terutama di bagian Selatan Bumi, bermigrasi ke Eropa dipandang sebagai pilihan terbaik atau bahkan hanya satu-satunya pilihan. Salah satu di antara faktor pendorong gelombang migrasi tersebut adalah kebijakan perikanan Uni Eropa itu sendiri. Perjanjian penangkapan ikan bilateral yang tidak adil yang termasuk dalam Kebijakan Perikanan Umum Uni Eropa (The European Common Fisheries Policy/ CFP), pada intinya memungkinkan Uni Eropa membayar sejumlah besar uang guna meyakinkan negara-negara non-Uni Eropa untuk membuka perairan mereka kepada kapal-kapal dari Eropa yang kapasitas tangkapnya telah melebihi ketersediaan stok ikan di perairan laut Eropa.¹⁰⁰

Di Senegal, misalnya, hampir 20% dari angkatan kerja nasional dipekerjakan di sektor perikanan, tetapi persediaan stok ikan dan penghasilan yang didapat dari sektor ini telah menurun akibat penangkapan ikan skala industri dan terutama melalui perjanjian dengan armada penangkap ikan asing termasuk perjanjian perikanan Uni Eropa.¹⁰¹ Perjanjian bilateral formal antara Uni Eropa dan Senegal tidak diperbarui setelah tahun 2006 karena hancurnya sumber daya ikan. Namun, sejak itu sejumlah perusahaan yang berbasis di Eropa menetap di Senegal sebagai usaha patungan. Mereka terdaftar secara resmi sebagai badan Senegal, dianggap sebagai perusahaan perikanan Senegal, dan pada saat yang sama memberikan peluang bagi armada Eropa untuk menangkap ikan secara informal di perairan Senegal dan menyimpan hasil tangkapan

TABEL 1

Persebaran dari Buruh Kerja Uni Eropa dan Non-Uni Eropa di dalam tenaga kerja non-lokal (2013)

	Total buruh kerja non-lokal	% Uni Eropa	% non-Uni Eropa
Spanyol	3,887	27.2%	72.8%
Prancis*	1,552	86.1%	13.9%
Denmark	871	60.2%	39.8%
Jerman	799	68.8%	31.2%
Portugal	390	32.4%	67.6%
Finlandia	189	82.0%	18.0%
Estonia*	85	62.4%	37.6%
Siprus**	42	70.8%	29.2%
Kroasia**	28	44.0%	56.0%

* Data merujuk kepada hanya sub-sektor penangkapan, karena tidak ada data yang tersedia bagi Uni Eropa/non-Uni Eropa dibagi bagi untuk sub-sector lain

** Angka persentase dihitung dari Sensus tahun 2011 sebagai satu-satunya sumber yang tersedia

Sumber: MRAG Ltd, Coffey dan AND International, 2016: 19



Gambar 16: Perahu nelayan Perancis. Foto oleh Thibault Josse

mereka untuk diekspor ke pasar Eropa."¹⁰² Jumlah kapal kecil milik penduduk setempat menurun sekitar 48% antara tahun 1998 dan 2008 saat kapal asing internasional yang menangkap ikan secara berlebihan dan para nelayan tradisional terusir keluar.¹⁰³

Perikanan industri merupakan salah satu sektor di Eropa yang semakin banyak mempekerjakan buruh tenaga kerja migran. Proses ironis ini terjadi di mana kapal pukat trawl dari Eropa menciptakan keadaan yang memaksa orang untuk bermigrasi dan mendapatkan keuntungan dari kedudukan mereka yang rentan bahaya sejak kedatangannya di Eropa dengan mempekerjakan mereka dalam pengaturan perburuan yang eksploitatif, sebagai salah satu proses utama yang membentuk cara migrasi yang bersinggungan dengan sektor perikanan di Eropa saat ini. Seorang nelayan menceritakan bagaimana dia meneteskan air mata ketika dia harus kembali ke perairan Senegal dalam kapal perikanan industri besar, namun tidak dapat menginjakkan kaki di daratan untuk mengunjungi keluarganya, dan kembali melanjutkan penjarahan sumber daya perikanan di wilayah pesisir tempat asalnya yang awalnya menyebabkan dirinya bermigrasi.¹⁰⁴

Tentu saja, tidak semua nelayan Afrika Barat bermigrasi, berbagai orang dari berbagai latar belakang bermigrasi

ke Eropa, dan tidak semua orang non-lokal yang akhirnya bekerja di sektor perikanan Eropa adalah sebelumnya adalah mantan nelayan. 'Migrasi adalah aksi kolektif.'¹⁰⁵ Ini telah menjadi bagian dari interaksi manusia selama berabad-abad. 'Hal itu muncul dari perubahan sosial dan mempengaruhi seluruh masyarakat. Migrasi dengan perahu berkembang pesat dalam jejaring berupa: jaringan migran, keluarga dan penyelenggara, juga jaringan migran yang telah menetap di negara tujuan.'¹⁰⁶ Memang, 'sering kali perempuan dan keluarga mereka yang membuat perjalanan seorang laki-laki terjadi dengan membiayai perjalanan mereka, membantu mereka mencari pekerjaan dan tempat tinggal ketika mereka tiba, dan mengambil beban tambahan yang mereka tinggalkan.'¹⁰⁷ Hancurnya sumber penghidupan pencaharian nelayan dan pola migrasi yang terus-menerus berkembang tidak hanya berdampak pada laki-laki, tetapi juga seluruh keluarga dan struktur keluarga. Misalnya, setelah Omar, nelayan yang berasal dari Senegal, menetap di Eropa, keluarganya dan keluarga pasangannya, Aida, merencanakan upacara pernikahan mereka. Tetapi karena dia masih belum memperoleh status hukum yang mengizinkannya untuk bepergian, dia tidak hadir secara fisik di pernikahannya sendiri - sesuatu yang semakin umum terjadi pada keluarga di Senegal.¹⁰⁸

Menciptakan kerentanan dalam sektor perikanan Eropa

Banyak warga negara Eropa merasa perlindungan terhadap risiko dan kerentanan bahaya yang ditawarkan oleh sektor perikanan tidak memadai. Meningkatnya tekanan dan ketidakpastian di antara para nelayan, ditambah dengan tingkat risiko dan kecelakaan yang tinggi di laut, membuat pemuda Eropa memilih untuk tidak meneruskan tradisi keluarga dalam kegiatan menangkap ikan secara turun menurun. Meningkatnya hambatan peraturan dan keuangan dan menghalangi akses kepada kapal serta kualifikasi keahlian yang dibutuhkan, menjadikan upaya untuk bekerja menangkap ikan menjadi tantangan yang luar biasa. Periode penangkapan ikan yang diatur secara ketat atau diberikan pembatasan, mendorong nelayan untuk terus melaut dalam waktu yang lebih lama atau dalam

cuaca buruk untuk menangkap cukup ikan demi mencari nafkah.¹⁰⁹ Warga negara Eropa umumnya memiliki lebih banyak kesempatan pendidikan dan pekerjaan daripada orang tua mereka. Selain itu, citra sektor perikanan yang terus memburuk karena dianggap berbahaya dan dihadapkan dengan terus menurunnya stok ikan¹¹⁰ kemudian menyebabkan rekrutmen dan regenerasi nelayan melalui cara turun-temurun dari ayah-ke-anak tidak lagi menjadi cara yang umum dilakukan.¹¹¹

Di Prancis, perekrutan paling sulit dilakukan di kapal berukuran sedang dan besar.¹¹² Stok ikan yang menurun ditambah dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk ikan secara khusus mendorong industri usaha perikanan pukat trawl besar untuk memotong upah



Gambar 17: Nelayan-nelayan Perancis. Foto oleh Thibault Josse



Gambar 18 – perahu nelayan Istanbul. Foto oleh Zoe W. Brent

guna mengkompensasi penurunan hasil tangkapan dan memaksimalkan laba keuntungan. Menurut Seafarers 'Rights International, hal ini adalah bagian besar dari industri perikanan yang utamanya mengalihkan kepada buruh yang berasal dari luar wilayah setempat.¹¹³ 'Para migran - termasuk mereka yang berasal dari negara diluar Uni Eropa - sering dipandang sebagai solusi atas kesulitan untuk mempekerjakan buruh dari penduduk setempat yang kadang-kadang menganggap pekerjaan menangkap ikan atau mengolah ikan sebagai pekerjaan berupah rendah dengan kondisi kerja yang tidak menyenangkan.¹¹⁴

Menangkap ikan selalu menjadi profesi yang berbahaya.

Nelayan lebih mungkin kehilangan nyawa mereka saat bekerja dibandingkan dengan pekerjaan lain, termasuk pekerjaan berbahaya seperti pertambangan dan konstruksi bangunan. Informasi dari badan perikanan dan organisasi nelayan menunjukkan bahwa tingkat kematian terus meningkat. Di Inggris, di mana aturan keselamatan sangat ketat, kecelakaan fatal di antara para nelayan 115 kali lebih besar daripada keseluruhan angkatan kerja selama periode 1996-2005.¹¹⁵

Namun, nelayan yang tidak bekerja di negara asalnya cenderung lebih tinggi menghadapi risiko dan cedera yang lebih tinggi. 'Sebagai contoh, 75 persen dari kematian di atas kapal penangkap ikan Inggris pada tahun 2008 adalah para nelayan migran baik dari Eropa Timur atau Filipina. Angka kematian Warga Filipina 350 per 100.000, dimana lebih dari tiga kali lipat angka kematian di Inggris 102 per 100.000.¹¹⁶

Tentu saja, mereka yang akhirnya bekerja di sektor perikanan Eropa Barat menghadapi situasi dan tantangan yang sangat beragam. Banyak nelayan dari luar wilayah setempat sangat menjadi incaran karena keterampilan mereka yang luar biasa saat di laut. Beberapa nelayan buruh migran, yang bekerja di perusahaan yang peduli terhadap masalah dalam migrasi, mendapatkan kondisi kerja dan kehidupan yang nyaman, meskipun kegiatan menangkap ikan masih menjadi pekerjaan yang berat dan berbahaya. Namun sayangnya, banyak yang berakhir dalam pekerjaan penangkapan ikan dengan memanfaatkan status keimigrasian mereka, khususnya ketika mereka berada dalam situasi administrasi yang melanggar hukum. Berbagai pengaturan dan mekanisme perburuhan yang eksploitatif memungkinkan pemilik kapal untuk menimpakan kerugian kepada pekerja.

Perdagangan manusia dan kondisi yang mirip atau memang sebuah perbudakan adalah fakta yang hari ini terjadi di perikanan Eropa Barat. Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Guardian, 'beberapa pemilik kapal dan agen penyalur buruh menyelundupkan pekerja Afrika dan Filipina ke Irlandia melalui titik masuk di bandara Heathrow di London dan Belfast, dan kemudian mengatur mereka untuk menyeberang dari Irlandia Utara ke Inggris melalui jalur darat, melewati jalan pintas menghindari Pengawasan imigrasi Irlandia.¹¹⁷ Nelayan yang diwawancarai oleh Guardian menunjukkan bahwa agen penyalur awak kapal membuat kesepakatan terlebih dahulu di negara asal nelayan, meminjamkan uang untuk perjalanan dan menagih biaya visa, yang sebenarnya tidak

ada. Meskipun tidak secara tegas diberitahu bahwa mereka akan berakhir bekerja tanpa dokumen saat dijanjikan oleh perekrut bahwa ada suatu pekerjaan yang menunggu mereka di Eropa, pada saat telah tiba para nelayan dibebankan hutang kepada agen perekrutan dan, 'banyak pekerja menjelaskan bahwa nyatanya mereka hidup dalam ketakutan akan dideportasi dan tetap berada di atas kapal meskipun sedang bersandar di pelabuhan karena pemiliknya akan di sanksi denda jika mereka terlihat dan dihentikan oleh pihak berwenang.¹¹⁸

Federasi Pekerja Transportasi Internasional (The International Transport Workers Federation/ITF), yang telah memelopori kampanye untuk perubahan peraturan di Irlandia,¹¹⁹ juga mengecam praktik serupa yang terjadi di Galicia, Spanyol.¹²⁰ Penelitian lapangan kami menemukan bahwa di Brittany, salah satu pemilik kapal yang terkenal sering menyita dokumen buruh migran, untuk menekan mereka agar menerima gaji rendah. Situasi ini menjebak nelayan buruh migran dalam pengaturan kerja yang menghisap, di mana mereka menderita akibat tekanan psikologis, kurang waktu istirahat tidur, kondisi kerja yang berbahaya dan waktu yang terbatas di daratan, yang semuanya membatasi sejauh mana mereka dapat berorganisasi secara kolektif atau bahkan melakukan kontak kerja yang dapat membantu mereka melarikan diri atau mendorong adanya kondisi kerja yang lebih baik.

Setiap orang yang bermigrasi ke Uni Eropa juga mungkin menghadapi kondisi pekerjaan yang tidak adil dan lain dari biasa. Sistem kerja dengan cara posted worker (penempatan pekerja)¹²¹, memungkinkan perusahaan Eropa untuk mempekerjakan pekerja tanpa mengikuti semua peraturan dari negara di tempat mereka bekerja. Sebaliknya para pekerja tunduk pada syarat kerja dari negara 'pengirim', di mana mereka tetap dipekerjakan secara resmi. Pada 2017, terdapat total 2,8 juta perjanjian kerja penempatan pekerja yang diterbitkan di Uni Eropa. Pekerja di bidang pertanian, perburuan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,8% dari total pekerja yang ditempatkan, tetapi ini setidaknya telah mewakili sekitar 10.972 pekerja pada tahun itu saja. Khususnya, 6.911 (63% dari pekerja penempatan di bidang pertanian, perburuan dan perikanan) berasal dari Polandia.¹²² Dan, dalam kasus perikanan Prancis, penelitian lapangan kami menunjukkan bahwa pekerja tersebut dipekerjakan oleh kapal perikanan industri untuk memotong biaya dan membayar upah lebih rendah dari yang diharapkan para nelayan di Prancis. Dalam kasus ini, kami juga menemukan beberapa para pemilik kapal asal

Spanyol yang telah membeli kapal pukat trawl tua Prancis untuk mengakses kuota penangkapan ikan Prancis, dan yang secara bergantung pada upah yang lebih rendah dari pekerja penempatan untuk menutup biaya yang timbul dari investasi. Secara bersama-sama, praktik-praktik tersebut mengungkap cara beberapa pemilik kapal memanfaatkan mobilitas gerak modal dan tenaga kerja di dalam Uni Eropa untuk mengeruk dan meningkatkan keuntungan. Komisi Eropa menggambarkan hal ini sebagai 'peminggiran sosial,' sebagai suatu situasi 'di mana penyedia jasa layanan asing dapat melemahkan penyedia layanan lokal karena menggunakan standar tenaga kerja mereka yang sangat rendah.'¹²³

Meskipun data yang dapat diandalkan untuk buruh migran di sektor perikanan yang dipekerjakan secara sah secara hukum di seluruh negara anggota Uni Eropa tidak ada, sebuah studi Komisi Eropa tahun 2016 mencoba untuk mengumpulkan sumber data yang telah ada. Penulis studi tersebut mengklaim bahwa sekitar 5,6% (19.000) pekerja yang dipekerjakan sah secara hukum di perikanan Uni Eropa adalah para migran, terkonsentrasi utamanya di Prancis, Spanyol dan Inggris. Sebagian besar tenaga kerja ini berasal dari pekerja yang berpindah antara negara Uni Eropa, seperti halnya 86,1% dari pekerja non-lokal di Prancis. Namun, negara-negara seperti Spanyol dan Portugal lebih bergantung pada pekerja non-lokal yang datang dari luar Uni Eropa, seperti yang ditunjukkan tabel di bawah ini.

Dalam banyak kasus, keragaman dalam kapal penangkapan ikan di dalam wilayah Eropa merupakan peluang untuk pertukaran budaya di atas kapal dan pembaruan generasi di dalam suatu sektor di mana banyak anak muda lokal lebih suka untuk tidak bekerja. Namun, penelitian lapangan kami menunjukkan bahwa di beberapa kapal terjadi ada rasisme terhadap pekerja, meskipun memiliki izin kerja, menghadapi rasisme dan diskriminasi yang dapat membuat situasi kerja sudah sulit menjadi semakin tidak dapat ditanggung. Nelayan Senegal yang bekerja di atas kapal pukat trawl besar di Brittany-Inggris menjelaskan bahwa mereka menghadapi pelecehan di laut karena rasisme dari beberapa awak kapal kulit putih. Hal ini dapat menyebabkan depresi atau ketegangan di antara awak kapal. Beberapa dari mereka yang diwawancarai menjelaskan bahwa hal ini akan bisa menjadi motif untuk meninggalkan kapal atau perusahaan tersebut, untuk mencari tempat di mana mereka merasa lebih diterima, meskipun mencari pekerjaan lain mungkin sangat sulit.

Menemukan jalan untuk bertahan hidup di Eropa

Bagi banyak orang yang bermigrasi ke Eropa, terus melaut menangkap ikan mungkin bukan pilihan. Salah satu contoh mencolok dari perjalanan ini adalah kasus pedagang kaki lima dari Barcelona, yang dikenal sebagai 'Manteros'. Mengingat dampak kebijakan perikanan Eropa di wilayah pesisir Senegal, sebagian dari mereka yang mantan nelayan Senegal memilih menjadi pedagang kaki lima untuk mencari nafkah - menjual pakaian, tas, sepatu, dan barang lain, di daerah wisata pelabuhan Port Vell di Barcelona yang baru-baru ini digentrifikasi. Namun, mereka sering dikriminalisasi oleh polisi dan terkadang oleh penduduk setempat karena berjualan secara tidak resmi di jalan. Pemerintah Kota Barcelona telah mencoba memperbaiki keadaan pedagang kaki lima dan menyambut pengungsi dengan lebih baik, tetapi sejauh ini belum ada solusi nyata untuk masalah tersebut.

Namun, sebagai cara untuk memerangi kerentanan dan stigma sosial yang mereka hadapi di Barcelona, komunitas pedagang kaki lima yang berasal dari Senegal membentuk koperasi pada tahun 2015 yang disebut 'Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes,' umumnya dikenal sebagai 'Sindicato de Manteros' (Union of Manteros/Serikat Materos). Setahun kemudian mereka menciptakan merek mereka sendiri, 'Top Manta' dan mulai menjual kaos dan switer buatan mereka sendiri dengan merek koperasi di sebuah toko tua di Raval. Setelah terbentuknya koperasi, banyak gerakan sosial yang memperhatikan perjuangan tersebut dan mulai mencari cara untuk berkolaborasi. Oleh karena itu, Sindicato de Manteros telah berpartisipasi dalam banyak pertemuan, kegiatan, dan lokakarya memasak untuk menjelaskan cerita dan perjuangan mereka, membuka jalan untuk kolaborasi lebih lanjut dengan kelompok dan gerakan lain. Dalam satu pertemuan seperti itu, mantan nelayan dan anggota kolektif berpartisipasi dalam 'pertemuan Kedaulatan Pangan dan Perikanan Skala Kecil' yang diselenggarakan di Barcelona pada Juni 2019. Ini adalah kesempatan penting bagi orang-orang dari berbagai gerakan kedaulatan pangan untuk memahami perjuangan mereka, dan membantu untuk mengangkat kasus mereka agar lebih terlihat dan membangun jembatan solidaritas. Dalam konteks krisis virus Corona, kelompok kolektif ini telah mengatur pengumpulan makanan dan sumbangan untuk dibagikan kepada keluarga yang membutuhkan. Namun, mereka terus menghadapi kriminalisasi dan pelecehan dari polisi yang mengancam akan mendenda mereka hingga € 60.000 Euro karena telah memberikan jaminan ketahanan pangan dasar bagi lebih dari 300 keluarga yang paling rentan di kota.¹²⁴

Selain mereka yang meninggalkan atau memasuki pekerjaan formal di bidang perikanan, banyak pengungsi yang menggunakan kegiatan perikanan rekreasi sebagai cara untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan protein rumah tangga / komunitas mereka. Di Prancis, misalnya, memancing untuk rekreasi adalah legal dan penting bagi banyak keluarga yang menderita akibat kebijakan imigrasi yang rasial, serta pengucilan sosial dan ekonomi. Di Douarnenez, di Brittany, perikanan rekreasi adalah sebuah kegiatan subsisten komunitas yang banyak dilakukan imigran dari kota-kota terdekat. Yang disebut dengan 'dermaga malu' yang mampu menarik penduduk setempat, orang-orang Afrika, Asia, dan Roma secara massal menangkap ikan tenggiri atau cumi-cumi. Apalagi di saat musim panas dan musim gugur saat sedang musimnya ikan-ikan tersebut, dermaga itu dipenuhi oleh ratusan orang yang sedang memancing. Alat tangkap yang digunakan berkisar dari alat pancing profesional berkualitas baik hingga kail dan tali sederhana yang dilempar dengan tangan. Baru-baru ini, terjadi konflik antara 'nelayan rekreasi' dan nelayan profesional yang bekerja di Douarnenez, dan pemerintah kota ingin melarang semua akses perikanan rekreasi untuk menghindari konflik. Kriminalisasi terhadap penangkapan ikan rekreasi ini akan berdampak signifikan pada keluarga yang mengandalkannya sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Memancing di dermaga ini merupakan kegiatan sosial yang ramai dan dipandang sebagai cara komunitas untuk saling bertemu dan mendukung solidaritas satu sama lain. Jika pelarangan ini diterapkan, maka nilai antar budaya dari dermaga di Douarnenez ini akan hilang. Larangan semacam ini juga bisa memicu perpecahan dan pengkambinghitaman terhadap imigran karena diduga menjadi pemicu penutupan dermaga. Menyadari hal ini, masyarakat setempat mengorganisir gerakan untuk membela 'hak menangkap ikan bagi semua orang', menuntut akses universal ke dermaga.

Nelayan tradisional di pesisir pantai laut Atlantik Prancis juga berupaya menciptakan akses penangkapan ikan bagi pemuda migran dengan satu fokus mengenai kondisi kerja yang layak, dan dukungan untuk memperoleh sertifikat pelatihan yang diperlukan. Di Saint Jean de Luz, di Negara Bagian Basque di Prancis, seorang mantan perempuan nelayan yang terlibat dalam gerakan nelayan skala kecil menjadi bagian dari organisasi yang mendukung para pengungsi. Ketika seorang pemuda menunjukkan ketertarikan pada sektor perikanan, dia memutuskan untuk meminta mantan kerabatnya untuk membawanya di atas kapal sehingga dia dapat mengetahui seperti apa kegiatan

perikanan. Yang dia katakan dalam bahasa Prancis-nya 'Ketika dia memberi tahu kami tentang kisahnya dan cara dia harus menyeberangi Laut Mediterania saat melihat teman-temannya sekarat, kami menyadari betapa beruntungnya kami. Jelas bahwa kita harus membantu

orang-orang ini agar bisa diselamatkan di laut dan memiliki kondisi kehidupan yang layak setelahnya. 'Pemuda ini sekarang sedang belajar di sekolah perikanan Ciboure, agar supaya dapat pergi melaut secepat mungkin, yang akan memberinya sumber penghidupan yang layak.

Munculnya solidaritas dan aksi kolektif di sektor perikanan?

Di hadapan krisis kemanusiaan yang terjadi di laut, para nelayan dan LSM yang terlibat dalam operasi penyelamatan di Mediterania terus-menerus dikriminalisasi oleh aparat keamanan Uni Eropa, yang sering disebut sebagai 'Benteng Eropa'. Pendanaan dan pelatihan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Penjaga Pantai Libya atau milisi lokal untuk mencegah pengungsi memasuki wilayah Eropa dengan mengembalikan mereka ke Libya. 'Hari ini solidaritas dengan para migran adalah kejahatan. Menyelamatkan seseorang yang tenggelam dalam air yang dingin dan kau akan menjadi sebagai seorang aktor perdagangan penjual manusia.'¹²⁵

Karena iklim politik dan kondisi kehidupan mereka yang rentan bahaya, pengungsi seringkali berjuang untuk berorganisasi secara politik dan banyak yang terjebak dalam paternalisme organisasi amal. Namun, pada tahun 2019, muncul gerakan kolektif 'Les Gilets Noirs' ('Rompi hitam', mengacu pada rompi kuning, gerakan sosial Prancis lainnya). Gerakan ini telah mengorganisir aksi besar-besaran di Paris untuk membela hak-hak pengungsi pencari suaka, dengan slogan 'hak dan dokumen untuk semua'.

Sejalan dengan itu, nelayan tradisional yang menghadapi krisis pembaharuan regenerasi seringkali berjuang untuk berorganisasi secara kolektif, seperti yang dapat kita lihat dari menurunnya keanggotaan dalam organisasi nelayan

skala kecil dan tradisional. Dengan demikian krisis pengungsi dan dukungan yang ingin diberikan oleh nelayan kepada orang yang bermigrasi dapat menjadi kesempatan bagi nelayan dan pengungsi untuk saling belajar dan memperkuat mobilisasi politik di masing-masing wilayah untuk memberikan menjawab kebijakan yang melemahkan nelayan skala kecil dan mengkriminalisasi pengungsi.

Tantangan untuk memastikan kondisi buruh pekerja yang adil di seluruh sektor perikanan sangat luar biasa, mengingat tingkat eksploitasi yang terlihat jelas. Dan meskipun ada tindakan luas untuk mengkriminalisasi upaya penyelamatan dan solidaritas, tindakan aksi otonom secara kolektif tetap terus muncul. Dalam istilah dari seorang nelayan yang menyelamatkan sebuah kapal yang tenggelam di Laut Mediterania, 'Ketika para migran dengan selamat berada di atas kapal penjaga pantai, mereka semua menoleh kepada kami sebagai tanda terima kasih, dengan tangan di hati. Itulah gambaran yang akan saya bawa selama sisa hidup saya, yang akan memungkinkan saya untuk memandang laut setiap hari tanpa penyesalan.'¹²⁶ Serupa, gerakan kedaulatan pangan juga perlu mengambil alih dan melawan pola eksploitatif buruh kerja dan migrasi yang diciptakan oleh sektor perikanan saat ini, jika mereka akan sistem pangan masa depan tanpa penyesalan.



Gambar 19 – Dermaga Memalukan atau 'Pier of Shame', Douarnenez. Foto oleh Zoe. W. Brent

4 Kesimpulan

Nelayan merupakan bagian pusat dari sistem pangan global kita. Dalam banyak cara yang sama seperti korporasi usaha industri pertanian yang berdampak negatif terhadap ekologi, sosial dan kesehatan ekonomi dari komunitas pedesaan, industri perikanan— dengan mendapat dorongan sistem pangan yang digerakkan oleh pencarian laba keuntungan— telah menangkap ikan laut berlebihan dan berkontribusi pada penghilangan budaya dan komunitas perikanan pesisir. Kedaulatan pangan dan agroekologi menawarkan visi yang sangat dibutuhkan untuk transformasi sistem pangan, namun secara historis telah mengabaikan peran nelayan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul gerakan nelayan dari skala lokal hingga global, bersama dengan organisasi aliansi lainnya untuk mengartikulasikan apa arti kedaulatan pangan dan agroekologi dalam konteks perikanan. Melalui publikasi, proposal kebijakan dan advokasi di FAO serta berbagai pertukaran pengetahuan kolaboratif, ide-ide tersebut telah terbentuk dan mulai memvisualisasikan masa depan yang lestari bagi penangkapan ikan sebagai bagian dari sistem pangan agroekologi yang lebih luas. Di luar penggunaan khusus terminologi kedaulatan pangan, praktik sehari-hari para nelayan di lapangan memberikan wawasan penting yang dapat menginformasikan perdebatan kunci di dalam gerakan kedaulatan pangan.

Melalui studi ini, kami telah menyoroti bagaimana produsen pangan skala kecil dihancurkan oleh sistem pangan global saat ini. Ketidaksetaraan gender dan bentuk penindasan rasial (sebagai contoh: politik yang menciptakan kondisi migrasi terpaksa dan mempekerjakan buruh migran dalam kondisi kerja yang tidak adil) di perikanan juga di antara produsen pangan skala kecil lainnya berakar pada sistem pangan yang digerakkan oleh pencarian keuntungan. Namun, di Turki kami melihat betapa pentingnya mekanisme penjualan langsung untuk koperasi nelayan skala kecil serta menyingkirkan perantara / tengkulak dan bisnis pangan laut skala besar. Kasus ini menunjukkan bahwa koperasi nelayan dapat menjadi gerakan utama yang mendefinisikan langkah-langkah menuju konsolidasi perikanan yang didukung masyarakat dan menghubungkan inisiatif ini dengan jaringan pertanian yang didukung masyarakat dan gerakan kedaulatan pangan secara lebih

luas. Sistem politik dan legislatif yang patriarkis lebih mengingkirkan perempuan nelayan daripada nelayan laki-laki dibawah hubungan produksi yang kapitalis, tetapi pengalaman di Indonesia menunjukkan bagaimana perempuan menjadi pemimpin kunci dalam mobilisasi gerakan mempertahankan wilayah yang menjadi fondasi produksi pangan. Nelayan skala kecil dari Senegal terpaksa bermigrasi sebagai konsekuensi dampak dari perampasan atas laut dan sumber daya mereka. Ribuan laki-laki dengan berani menempuh perjalanan mengerikan dalam mencari pekerjaan yang membawa berbagai jenis eksploitasi ekonomi dan politik sebagai buruh migran di tempat kedatangannya, dan seringkali meninggalkan beban ganda reproduksi sosial yang harus dikelola oleh perempuan.

Dalam konteks ini, membawa peran nelayan ke dalam perdebatan kedaulatan pangan — serta semua dinamika yang rumit atas kelas, gender dan rasial yang menentukan persimpangan tersebut — memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang beberapa tantangan dan peluang untuk transformasi sistem pangan. Mendengarkan suara nelayan dan memasukkan pertanyaan yang muncul dalam debat agroekologi dan kedaulatan pangan membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua orang, di mana produksi pangan terfokus pada manusia dan bekerja dengan alam, penyedia pangan yang dihargai, sistem dan kontrol pangan dilokalisasi, dan pengetahuan serta keterampilan dibangun bersama dengan komunitas (nelayan).



Gambar 20 – Foto oleh Thibault Josse

Catatan kaki

- 1 FAO, 2015. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. <http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf> dan FAO, 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture: Sustainability in Action. <http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf>
- 2 Pauly, D., 2006. Major Trends in Small-Scale Marine Fisheries, with Emphasis on Developing Countries, and Some Implications for the Social Sciences. *MAST*, 4(2): 7-22. http://www.marecentre.nl/mast/documents/Pauly_Mast2006vol_4no_2_new.pdf
- 3 TNI, 2014. The Global Ocean Grab: A Primer. https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab.pdf
- 4 Sinha, S. 2012. Transnationality and the Indian Fishworkers' Movement, 1960s–2000. *Journal of Agrarian Change*, 12(2-3), hlm. 364–389.
- 5 <https://www.foodsovereignty.org/ipc-statement-cape-town/>
- 6 Lihat: NAMA's webpage: <https://www.namanet.org>
- 7 REJOPRAO: La red de periodistas por unas pesquerías responsables del África Occidental in Gorez, B. 2016. Voces de las pesquerías artesanales africanas. *Revista Soberanía Alimentaria*, 24, hlm. 21–26. https://www.soberaniaalimentaria.info/images/descargas/sabc_24.pdf
- 8 REDSAG: Red por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. <http://redsag.net/site/>
- 9 https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyeleni_EN.pdf
- 10 Nyéléni 2015—Declaration of the international forum for agroecology. Nyéléni—forum for food sovereignty. <http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-Nyeleni-2015/>
- 11 Seperti yang Sinha (2012) jelaskan, "Secara khusus, saya berhati-hati untuk tidak menggunakan 'kaca sudut pandang pertanian' untuk mempelajari politik di sektor perikanan dan memperdebatkan kedalaman sejarah dan analisis kritis dari konsep 'transnasionalitas' itu sendiri. "Meskipun demikian, kami melihat wawasan penting yang dapat diperoleh dari pandangan perbandingan pada gerakan petani dan nelayan transnasional.
- 12 GRAIN, 2008. <https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security>; TNI, 2014. The Global Ocean Grab: A Primer. https://www.tni.org/files/download/the_global_ocean_grab.pdf; García-Allut, A. 2016. Pesca y agricultura: Mismos problemas, mismas respuestas? *Revista Soberanía Alimentaria*, 24, hlm. 10–14. https://www.soberaniaalimentaria.info/images/descargas/sabc_24.pdf; KNTI and WFFP, 2017. Food Sovereignty and Agroecology in Small-scale Fisheries. https://worldfishers.org/wp-content/uploads/2017/09/WFFP.Food_Sov_web_.pdf
- 13 KNTI and WFFP, 2017. Food Sovereignty and Agroecology in Small-scale Fisheries. hlm. 2. <http://worldfishers.org/2017/09/20/food-sovereignty-agroecology-small-scale-fisheries/>
- 14 KNTI and WFFP, 2017. Food Sovereignty and Agroecology in Small-scale Fisheries. <http://worldfishers.org/2017/09/20/food-sovereignty-agroecology-small-scale-fisheries/>
- 15 Kami menggunakan metodologi berikut: Pertama, kami membuat tinjauan pustaka berdasarkan pencarian kata kunci menggunakan kombinasi kata-kata berikut baik dalam bahasa Inggris dan Spanyol: i. "agroecology and fisheries/ agroekologi dan perikanan"; ii. "Agroecologia y pesca"; iii. "fisheries and food sovereignty/perikanan dan kedaulatan pangan"; iv. "Pesca y soberanía alimentaria" di Google Cendekia. Kedua, kami mengumpulkan sumber informasi sekunder utama (termasuk laporan, halaman web, manifesto dan prosiding konferensi, dll.) yang terkait dengan nelayan skala kecil dan kedaulatan pangan baik melalui pencarian situs web untuk dokumen-dokumen kunci maupun dengan berkonsultasi dengan aktor-aktor kunci di lapangan tentang pengetahuan mereka terhadap praktik dan artikulasi inisiatif (melalui metode pengambilan sampel bola salju).
- 16 Lihat: Elyse N. Mills, "Implicating 'Fisheries Justice' Movements in Food and Climate Politics," *Third World Quarterly* 39, no. 7 (July 3, 2018): 1270–89, <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1416288>; Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard, and Carsten Pedersen, "The Blue Fix; Unmasking the Politics behind the Promise of Blue Growth," Policy Brief (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), October 29, 2018), <https://www.tni.org/en/bluegrowth>; Svein Jentoft, "Walking the Talk: Implementing the International Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries," *Maritime Studies* 13, no. 1 (November 5, 2014): 1–15, <https://doi.org/10.1186/s40152-014-0016-3>.
- 17 Avendaño dan WFF, 2006. La pesca artesanal en la discusión de la Soberanía Alimentaria. http://www.terre-citoyenne.org/fileadmin/admin/document/WFF_2006_PA_PescaySoberaniaAlimentaria_es.pdf
- 18 KNTI dan WFFP, 2017. Agroecology and Food Sovereignty in Small-Scale Fisheries. <http://worldfishers.org/2017/09/20/food-sovereignty-agroecology-small-scale-fisheries/>
- 19 Colombo, G.M. dkk., 2015. Agroecology and artisanal fisheries: strategies for value addition of fish coming from the fishing community of Machadinho D'Oeste, RO, Brazil. <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/18859/13036>
- 20 Seixas, C.S. dkk., 2018. Collaborative Coastal Management in Brazil: Advancements, Challenges, and Opportunities. Chapter 18 In S. Salas et al. (eds.), *Viability and Sustainability of Small-Scale Fisheries in Latin America and The Caribbean*, MARE Publication Series 19, hlm. 425–251. https://doi.org/10.1007/978-3-319-76078-0_18
- 21 Cotrim, D.S., 2009. Analysis of Sustainability in Artisanal Fisheries. *Rev. Bras. De Agroecologia*, 4(2), hlm. 261–264. <http://revistas.aba-agroecologia.org.br/index.php/cad/article/view/3333/2684>
- 22 Levkoe, C.Z. hlm., 2017. Fish as Food: Exploring a food sovereignty approach to small-scale fisheries. *Marine Policy*, 85, hlm. 65–70. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.018>
- 23 Rodríguez-Crisóstomo, C.G., 2016. Experiencias de economía solidaria del Altiplano Occidental de Guatemala: Características socio-económicas y efectos en las familias involucradas. Tesis de Maestría, FLACSO –Sede Guatemala. http://biblioteca.flacso.edu.gt/library/images/1/16/Tesis_CesarR.pdf
- 24 Inakake de Souza, L., 2017. La pesca artesanal y la agroecología una aproximación acerca de la soberanía alimentaria en la playa de la "Pedra do Sal", Área de Protección Ambiental Delta del Parnaíba, Piauí, Brasil. Tesis de Maestría. Universidad de Córdoba.
- 25 <https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/55-numero-24/330-portada-24>

- 26 Boletín Nyeleni 27, September 2016. https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_27_ES.pdf
- 27 Lihat IPC Working Group on Fisheries https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
- 28 <https://www.eurovia.org/declaration-of-small-scale-food-producers-organizations-and-civil-society-organizations-at-the-ii-international-symposium-on-agroecology-convened-by-fao/>
- 29 <https://cloc-viacampesina.net/declaracion-final-del-primero-congreso-nacional-de-unidad-de-campo-en-brasil/>
- 30 <https://www.tni.org/en/event/webinar-small-fisher-folk>
- 31 IPC dkk., 2016. People's Manual on the Guidelines on Governance of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. <http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf>
- 32 Nyéléni 2015—Declaration of the international forum for agroecology. Nyéléni—forum for food sovereignty. <http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-Nyeleni-2015/>
- 33 <https://www.osala-agroecologia.org/vii-congreso-internacional-de-agroecologia/comunicaciones/>
- 34 <https://cagj.org/summer-school/>
- 35 <https://www.facebook.com/hashtag/blockcorporatesalmoon>; Community Alliance for Global Justice, "Salmon People: A Backgrounder to Northwest Tribal Opposition to GE Salmon," Backgrounder (Seattle: CAGJ, n.d.). <https://cagj.org/wp-content/uploads/CAGJ-Salmon-People-Backgrounder.pdf>
- 36 Stoll, J. dkk., 2015. Local seafood: rethinking the direct marketing paradigm. *Ecology & Society*, 20(2), hlm. 1-14. <https://localcatch.org/wp-content/uploads/2015/06/ES-2015-7686.pdf>
- 37 Bolton, A.E. dkk., 2016. Describing the diversity of community supported fishery programs in North America. *Marine Policy*, 66, 21-29. <https://localcatch.org/wp-content/uploads/2016/02/Bolton-et-al.pdf>
- 38 Brinson, A. dkk., 2011. Direct marketing strategies: The rise of community supported fishery programs. *Marine Policy*, 35(4), 542-548. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.01.014>
- 39 Wolfenson, K.D.M. and FAO, 2013. Coping with the food and agriculture challenge: smallholders' agenda. <http://www.fao.org/3/a-ar363e.pdf>
- 40 FAO CFS, 2012. Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security. <http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf>
- 41 FAO, 2015. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. <http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf>
- 42 Lihat situs dari Pokja IPC mengenai Perikanan https://www.foodsovereignty.org/working_groups/fisheries/
- 43 <https://digitalibrary.un.org/record/1661560>
- 44 Jennifer Clapp dan Doris Fuchs, eds., *Corporate Power in Global Agrifood Governance*, 1 edition, Food, Health, and the Environment (Cambridge, Mass: The MIT Press, 2009); Philip McMichael, "A Food Regime Genealogy," *Journal of Peasant Studies* 36, no. 1 (January 2009): hlm. 139-69, <https://doi.org/10.1080/03066150902820354>; Harriet Friedmann, "Distance and Durability: Shaky Foundations of the World Food Economy," *Third World Quarterly* 13, no. 2 (1992): hlm. 371-83; Nyéléni, "Declaration of Nyéléni," 2007, <https://nyeleni.org/spip.php?article290>.
- 45 Sylvia Kay, "Connecting Smallholders to Markets; An Analytical Guide" (International Civil Society Mechanism, Hands On the Land Alliance for Food Sovereignty, 2016).
- 46 <https://laplatjeta.net/es/>
- 47 Studi kasus singkat ini mengacu pada riset aksi partisipatif yang dihasilkan dari kerja sama erat dengan Istanbul Birlik, terutama dalam pertemuan internasional dengan perwakilan Forum Dunia Nelayan (WFFP) dan gerakan kedaulatan pangan lainnya dari Prancis, Spanyol, India, dan Belgia. Pada Maret 2019, wawancara dilakukan dengan perempuan nelayan, nelayan laki-laki, dan anggota dewan Istanbul Birlik pada lokakarya tahunan mereka di Antalya, Turki. Selain itu, literatur sekunder dan penelitian sebelumnya oleh penulis telah digunakan sebagai dasar artikel ini.
- 48 Ulman, A. dkk. 2020. The Lost Fish of Turkey: A Recent History of Disappeared Species and Commercial Fishery Extinctions for the Turkish Marmara and Black Seas. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00650>
- 49 Situs dari Istanbul Birlik (2019). Tersedia di: <https://m.facebook.com/istanbulkooperatiflerbirligi/>
- 50 Lihat Ertör Akyazı, P. 2020. Contesting growth in marine capture fisheries: the case of small-scale fishing cooperatives in Istanbul. *Sustainability Science*, hlm 45-62. Tersedia di: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-019-00748-y> untuk diskusi tentang peran nelayan skala kecil dalam menentang kebijakan Pertumbuhan Biru di Turki dan aliansi yang telah mereka jalin dengan aktor politik yang berjuang untuk kedaulatan pangan.
- 51 SÜRKOOP webpage (2019) Available at: <https://www.surcoop>
- 52 Kutipan dari Ketua organisasi Istanbul Birlik di Ertör Akyazı 2020, hlm. 53
- 53 Ünal, V. & Göncüoğlu, H. (2012) Fisheries management in Turkey. In: Tokaç A, Gücü AC, Öztürk B (eds) *The state of the Turkish fisheries*. Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, pp. 516-550.
- 54 Ertör, I. (2012) Sustainable Local Management of Common-Pool Resources: The Environmental Conflict on Fisheries in Güzelce. *Poster presentation*.
- 55 Avrupa Postası (4 February 2012). Tersedia di: <https://www.avrupa-postasi.com/turkiye/troLCu-saldirisinda-gozunu-kaybeden-kooperatif-baskani-taburcu-oldu-h4729.html>; dan TurkSail (30 January 2012) Available at: <http://www.turksail.com/genel-haberler/7103-kacak-troLCuel-er-kooperatif-bakanna-silahla-saldrd>
- 56 Lihat: the Greenpeace Bulletin, No. 44. Tersedia di: <https://www.akdogan.gen.tr/greenpeace-bulten/greenpeace-bulteni-sayi-44/>
- 57 Ertör Akyazı 2020
- 58 Lihat kampanye himbauan untuk tidak memancing juvenile bluefish di bawah ukuran 24 cm. Bisa diakses di: <https://www.yesilist.com/lufer-koruma-timinden-cagri-24-san-timin-altindakileri-almayin-satmayin/>
- 59 Ertör Akyazı 2020, hlm. 57
- 60 interview with the head of Istanbul Birlik, 2016
- 61 Ertör Akyazı 2020
- 62 Goodman, D., & DuPuis, E.M. (2002) *Sociology of agriculture*. *Sociologia Ruralis* 42(1): 5.
- 63 Urgenci - Deck to Dish (2019) diakses di: <https://urgenci.net/deck-to-dish-increasing-the-visibility-and-the-resilience-of-the-community-supported-fisheries-movement/>; WFFP dan KNTI laporan (2017) tersedia di: https://worldfishers.org/wp-content/uploads/2017/09/WFFP.Food_Sov_.web_.pdf

- 64 Witter, A. & Stoll, J. (2017) Participation and resistance: Alternative seafood marketing in a neoliberal era. *Marine Policy*, 80:130–140. Ertör Akyazi (2020), op.cit.
- 65 Lihat: BÜKOOP's webpage: <https://bukoop.org>
- 66 Saturnino Borrás dkk., "Land Grabbing in Latin America and the Caribbean, Viewed from Broader International Perspectives" (Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe, FAO Regional Office, Santiago, Chile: FAO, 2011), <http://www.tni.org/report/land-grabbing-latin-america-and-caribbean-broader-international-perspectives-0>; Saturnino M. Borrás, Jennifer C. Franco, and Chunyu Wang, "The Challenge of Global Governance of Land Grabbing: Changing International Agricultural Context and Competing Political Views and Strategies," *Globalizations* 10, no. 1 (February 1, 2013): hlm. 161–79, <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.764152>; Marc Edelman, Carlos Oya, and Saturnino M. Borrás, "Global Land Grabs: Historical Processes, Theoretical and Methodological Implications and Current Trajectories," *Third World Quarterly* 34, no. 9 (November 2013): hlm. 1517–31, <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.850190>; Jenny Franco dkk., "The Global Land Grab; a Primer" (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), February 2013), <http://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf>; David Harvey, *The New Imperialism* (New York: Oxford University Press, 2003).
- 67 TNI dkk., "The Global Ocean Grab," A Primer (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), September 2014); Brent Barbesgaard, and Pedersen, "The Blue Fix; Unmasking the Politics behind the Promise of Blue Growth"; Mads Barbesgaard, "Blue Carbon: Ocean Grabbing in Disguise?," Policy Brief (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), February 1, 2016), <https://www.tni.org/en/publication/blue-carbon-ocean-grabbing-in-disguise>.
- 68 Lihat kampanye La Via Campesina menentang perampasan tanah dan kampanye WFFP melawan perampasan Laut.
- 69 <http://www.cppnacional.org.br/campanhas/campanha-pelo-territorio-pesqueiro>
- 70 Lihat website MPP: <http://peloterritoriopesqueiro.blogspot.com/2019/11/mais-de-300-pescadores-e-pescadoras.html>
- 71 FAO, 2015. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. <http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf>
- 72 Studi kasus ini didasarkan pada observasi partisipan dan wawancara dengan perempuan nelayan dari Tallo di Sulawesi Selatan serta dengan pengurus komunitas dari Solidaritas Perempuan. Riset ini dilaksanakan pada tahun 2018-2019 di Indonesia dalam konteks lokakarya khusus perempuan yang dibentuk untuk mendukung perubahan sosial dan pemberdayaan perempuan dalam menghadapi kebijakan patriarki dan norma budaya. Bagian berikut menjelaskan bagaimana Solidaritas Perempuan melakukan pekerjaan ini di lapangan.
- 73 Johnny Langenheim, "Millions of Small Scale Fishers Facing Economic Exclusion," *The Guardian*, July 28, 2017, sec. Environment, <https://www.theguardian.com/environment/the-coral-triangle/2017/jul/28/millions-of-small-scale-fishers-facing-economic-exclusion>.
- 74 Lebih detail terkait Tata Ruang Laut lihat: Thibault Josse dkk., "Marine Spatial Planning. Resolving or Entrenching Conflicts over and in Ocean Space?" (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), 2019), <https://www.tni.org/en/publication/marine-spatial-planning>.
- 75 Untuk informasi lebih lanjut lihat: <https://www.ejatlas.org/conflict/reclamation-project-makassar-indonesia>
- 76 Fadhilah Trya Wulandari, "Gender Justice in Green Development: Women in Aquacultures and Coastal Defence Strategy in North Jakarta" (Master of Arts in Development Studies, The Hague, Netherlands, International Institute of Social Studies, 2018).
- 77 Kurniawaty, A. 2019, catatan lapangan.
- 78 Kurniawaty, A. 2019, catatan lapangan.
- 79 Kurniawaty, A. 2019, catatan lapangan.
- 80 Susan Buckingham-Hatfield, *Gender and Environment*, Routledge Introductions to Environment Series, London (Routledge, 2000), 114.
- 81 FAO, 2018. Women's Participation and Leadership in Fisherfolk Organizations and Collective Action in Fisheries: A review of evidence on enablers, drivers and barriers. <http://www.fao.org/3/I8480EN/I8480en.pdf>
- 82 Kurniawaty, A. 2019, catatan lapangan.
- 83 Josse dkk., "Marine Spatial Planning. Resolving or Entrenching Conflicts over and in Ocean Space?"
- 84 <https://viacampesina.org/es/sin-feminismo-no-agroecologia/>
- 85 <https://viacampesina.org/es/a-que-nos-enfrentamos/patriarcado/campana-basta-de-violencia-contra-las-mujeres/>
- 86 Turhan, E., Zografos, C. dan Kallis, G. 2015. Adaptation as biopolitics: Why state policies in Turkey do not reduce the vulnerability of seasonal agricultural workers to climate change. *Global Environmental Change*, 31, hlm. 296-306. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.02.003>; Holt-Giménez, E., Brent, Z. dan Shattuck, A. 2010. Food workers – food justice: linking food labor and immigrant rights. Food First backgrounder. Oakland: Institute for Food and Development Policy, 16(2). <https://foodfirst.org/publication/food-workers-food-justice-linking-food-labor-and-immigrant-rights/>
- 87 https://www.eldiario.es/desalambre/ONU-exige-espana-mejorar-deplorables-condiciones-temporeros-huelva-gente-muerta_1_6125145.html
- 88 https://www.eldiario.es/sociedad/trabajo-investiga-1-600-posibles-irregularidades-laborales-sanitarias-explotaciones-agrarias-focos-rebotes-covid-19_1_6160109.html
- 89 <https://www.france24.com/es/20200805-espaa%3%B1a-explotacion-temporero-eleazar-blandon>
- 90 Rory Carroll dkk., "Covid-19 Crisis Stokes European Tensions over Migrant Labour," *The Guardian*, May 11, 2020, sec. World news, <https://www.theguardian.com/world/2020/may/11/covid-19-crisis-stokes-the-european-tensions-over-migrant-labour>; Mark Akkerman, "COVID-19 and Border Politics," Policy Briefing (Amsterdam: Transnational Institute (TNI) & Stop Wapenhandel, 2020), <https://www.tni.org/en/publication/covid-19-and-border-politics>.
- 91 Environmental Justice Foundation, 2020. Illegal fishing and human rights abuses in the Taiwanese fishing fleet. <https://ejfoundation.org/resources/downloads/Taiwan-briefing-IUU-HR-2020-July.pdf>; Environmental Justice Foundation, 2015. Thailand's Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang's Fishing Industry. <https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF-Thailand-Seafood-Slaves-low-res.pdf>; EJAtlas, 2019. Slave and forced labor in the seafood industry, Thailand. <https://ejatlas.org/conflict/slave-and-forced-labor-in-seafood-industry-thailand>
- 92 Holt-Giménez, E., Brent, Z. dan Shattuck, A. 2010, hlm.1.

- 93 Selain mengambil literatur sekunder tentang topik tersebut, artikel singkat ini didasarkan pada kerja lapangan di mana kami melakukan wawancara dengan para nelayan, pengungsi dan orang-orang yang bekerja di lembaga publik yang terlibat dalam tata kelola kelautan di Spanyol, Prancis, dan Yunani sepanjang 2018 dan 2019. Refleksi juga diambil dari periode kerja di kapal penangkap ikan, baik industri maupun skala kecil dengan nelayan lokal dan non-lokal serta melalui keterlibatan dengan organisasi yang memberikan dukungan bagi pengungsi di Paris dan Athena.
- 94 H. Nyamnjoh, "We Get Nothing from Fishing": *Fishing for Boat Opportunities amongst Senegalese Fisher Migrants* (Cameroon and The Netherlands: African Studies Centre and Langaa Publishers, 2010), hlm. 29–30, <https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/22174>.
- 95 Nyamnjoh, 2010 cited in Juliette Hallaire, "Constructing Maritime Geographies: The Pragmatic Mobility of Senegalese Fishermen" (PhD, Keele University, 2015), hlm. 181.
- 96 Hallaire, hlm. 183.
- 97 Hallaire, hlm. 182.
- 98 Clare Cummings dkk., "Why People Move: Understanding the Drivers and Trends of Migration to Europe," Working Paper (London: Overseas Development Institute, 2015), hlm. 18.
- 99 Heidrun Friese, "Thalassographies of Departure, Disaster and Rescue: Fishermen and Undocumented Mobility," *Etnofoor* 27, no. 1 (2015): hlm. 21.
- 100 Elyse Mills dkk., "EU Fisheries Agreements: Cheap Fish for a High Price," Policy Brief (Amsterdam, Copenhagen and Cape Town: Masifundise, Afrika Kontakt, Transnational Institute (TNI), November 2017), hlm. 5.
- 101 Mills dkk., hlm. 9; lihat juga: <https://www.worldfishing.net/news101/regional-focus/senegal>.
- 102 Juliette Hallaire, "Maritime Migration from Senegal to Spain: Fishermen's Experiences," in *EurAfrican Borders and Migration Management. Political Cultures, Contested Spaces and Ordinary Lives*, ed. Paolo Gaibazzi, Stephan Dunnwald, and Alice Bellagamba, Palgrave Series in African Borderlands Studies (Palgrave Macmillan US, 2017), hlm. 228.
- 103 Mills dkk., "EU Fisheries Agreements: Cheap Fish for a High Price," hlm. 9.
- 104 Field notes, June 21, 2019, Barcelona.
- 105 Nyamnjoh, *We Get Nothing from Fishing*, hlm. 4–5.
- 106 Nyamnjoh, 4mnj
- 107 Laura Dean, "For Women Left behind in Senegal, the Exodus to Europe Brings Rewards, Risk and Regret," *The Globe and Mail*, May 28, 2017, <https://www.theglobeandmail.com/news/world/senegal-women-migrants-europe/article35111369/>.
- 108 Hallaire, "Constructing Maritime Geographies: The Pragmatic Mobility of Senegalese Fishermen," hlm. 215–16.
- 109 I. M Kaplan dan H. L Kite-Powell, "Safety at Sea and Fisheries Management: Fishermen's Attitudes and the Need for Co-Management," *Marine Policy* 24, no. 6 (November 1, 2000): hlm. 495, [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(00\)00026-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(00)00026-9).
- 110 Franklin, P. (2007) *Innovative Recruitment Strategies in the Fisheries Sector*. UK: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. p. 21, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2007/531/en/1/ef07531en.pdf
- 111 Cornwall Rural Community Charity dan Rose Regeneration, "Fishing for a Future. An Analysis of Need, Challenges and Opportunities in UK Fishing Communities" (UK: Seafarers UK, 2018), hlm. 27, <https://www.seafarers.uk/wp-content/uploads/2018/06/Seafarers-UK-Fishing-For-a-Future-Report.pdf>.
- 112 Franklin, "Innovative Recruitment Strategies in the Fisheries Sector," hlm. 21.
- 113 Lawrence dkk., "Revealed"; <https://seafarersrights.org/seafarers-subjects/fishers-and-plunders/accident-statistics/>
- 114 Cornwall Rural Community Charity dan Rose Regeneration, "Fishing for a Future. An Analysis of Need, Challenges and Opportunities in UK Fishing Communities," hlm. 27.
- 115 <https://seafarersrights.org/seafarers-subjects/fishers-and-plunders/accident-statistics/>
- 116 <https://seafarersrights.org/seafarers-subjects/fishers-and-plunders/accident-statistics/>
- 117 Lawrence dkk., "Revealed."
- 118 Lawrence dkk. (ibid.)
- 119 See: <https://justiceforfishers.org/ireland/>
- 120 Natalia Valiño, "Marineros de bajo coste," *El País*, October 2, 2007, sec. Galicia, https://elpais.com/diario/2007/10/02/galicia/1191320305_850215.html.
- 121 *Posted Workers* adalah pekerja yang diutus dalam dinas oleh pemberi kerja/majikannya untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan kerja di negara lain yang masih anggota Uni Eropa secara sementara/waktu tertentu. Atau dalam konteks sebuah kontrak pemberian pelayanan, salam suatu kelompok usaha atau sebuah perekrutan kerja melalui sebuah agen yang sementara. Sumber: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en>
- 122 Frederic De Wispelaere dan Jozef Paolet, "Posting of Workers. Report on A1 Portable Documents Issued in 2017," Network Statistics FMSSFE (Brussels: European Commission and HIVA KU Leuven, 2018), hlm. 51–52, <https://www.etk.fi/wp-content/uploads/Komissio-tilastoraportti-Posting-of-workers-2017.pdf>.
- 123 Monika Kiss, "Understanding Social Dumping in the European Union," EPRS: European Parliamentary Research Service (European Parliament, March 2017), hlm. 2, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599353/EPRS_BRI\(2017\)599353_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599353/EPRS_BRI(2017)599353_EN.pdf).
- 124 <https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/multan-60.000-euros-red-apoyo-mutuo-antirracista-reparte-comida-migrantes-barcelona>
- 125 Yasha Maccanico dkk., "The Shrinking Space for Solidarity with Migrants and Refugees: How the European Union and Member States Target and Criminalize Defenders of the Rights of People on the Move" (Amsterdam: Transnational Institute (TNI), 2018), 6, https://www.tni.org/files/publication-downloads/web_theshrinkingspace.pdf.
- 126 Lorenzo Tondo, "Sicilian Fishermen Risk Prison to Rescue Migrants: 'No Human Would Turn Away,'" *The Guardian*, August 3, 2019, sec. World news, <https://www.theguardian.com/world/2019/aug/03/sicilian-fishermen-risk-prison-to-rescue-migrants-off-libya-italy-salvini>.



Gambar 21: Kampung nelayan di Uganda. Foto oleh Zoe W. Brent



Transnational Institute (TNI) adalah lembaga advokasi dan penelitian internasional yang berkomitmen untuk membangun planet bumi yang adil, demokratis dan lestari. Selama lebih dari 40 tahun, TNI telah banyak bekerja dengan membangun hubungan yang unik dengan gerakan sosial, serta melibatkan para sarjana dan pembuat kebijakan.

www.TNI.org

PLEINE MER

Pleine Mer adalah organisasi berbasis di Prancis dari nelayan dan konsumen perikanan yang mendorong transisi berkeadilan dalam sektor perikanan. Anggota dan staf Pleine Mer berkomitmen untuk mengembangkan dukungan komunitas yang kuat terhadap sektor perikanan, mampu menjaga kelestarian perikanan skala kecil dalam waktu yang panjang. Plein Mer juga bekerja dengan berbagai kelompok nelayan dan LSM dalam upaya untuk mengkonsolidasi perlawanan terhadap perikanan industri.

www.associationpleinemer.com



Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights

Solidaritas Perempuan, atau Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia adalah organisasi feminis di Indonesia yang berdisi sejak 10 Desember 1990. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, SP telah bekerja bersama perempuan untuk membangun demokrasi dari akar rumput, berbasiskan atas prinsip keadilan, kesadaran ekologis, penghormatan terhadap pluralisme berbasiskan atas suatu hubungan yang setara antara perempuan dan laki-laki yang bisa berbagi akses dan kontrol atas sumber daya baik alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam cara yang adil.

www.solidaritasperempuan.org